

Sekretariat Utama

Laporan Keuangan

Audited

2025



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat Utama BPOM Sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama BPOM berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Utama BPOM TA 2025 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya serta kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Sekretariat Utama BPOM. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretariat Utama BPOM



Antonius Tarigan
Dr. Ir. Antonius Tarigan, M. Si

NIP. 196904031995031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Lampiran	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Akuntansi Sekretariat Utama BPOM	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	9
A.3. Basis Akuntansi	9
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	18
B.1. Pendapatan	19
B.2. Belanja	25
B.2.1. Belanja Pegawai	27
B.2.2. Belanja Barang	28
B.2.3. Belanja Modal	29
B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30
B.2.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31
B.2.3.3. Belanja Modal Lainnya	31
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	33
C.1. Aset Lancar	33
C.1.1. Kas Lainnya Setara Kas	33
C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka(<i>Prepaid</i>)	33
C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	34

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	34
C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (<i>Netto</i>)	35
C.1.6. Persediaan	35
C.2. Aset Tetap	36
C.2.1. Tanah	36
C.2.2. Peralatan dan Mesin	37
C.2.3. Gedung dan Bangunan	40
C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	44
C.2.5. Aset Tetap Lainnya	46
C.2.6. Kontruksi Dalam Pengerjaan	47
C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	49
C.3. Aset Lainnya	49
C.3.1. Aset Tak Berwujud	50
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	50
C.3.3. Aset Lain-Lain	51
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	53
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	53
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	54
C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka	55
C.5. Ekuitas	56
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	57
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	57
D.2. Beban Pegawai	59
D.3. Beban Persediaan	61
D.4. Beban Barang dan Jasa	61
D.5. Beban Pemeliharaan	63
D.6. Beban Perjalanan Dinas	63
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	64
D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	65
D.9. Kegiatan Non Operasional	66
D.10. Pos Luar Biasa	70
E. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	71

E.1. Ekuitas Awal	71
E.2. Surplus (Defisit LO)	71
E.3. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	71
E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset	71
E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan	71
E.3.3. Koreksi Atas Reklasifikasi	71
E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap	72
E.3.5. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	72
E.3.6. Koreksi Lain-Lain	73
E.4. Transaksi Antar Entitas	74
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain	74
E.4.2. Diterima Dari Entitas Lain	75
E.4.3. Transfer Keluar	75
E.4.4 Transfer Masuk	76
E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung	77
E.5 Ekuitas Akhir	77
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	78
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA	78
F.1.1. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	78
F.1.2. Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)	78
F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	79
F.2.1. Pengelola Keuangan Sekretariat Utama BPOM	79
F.2.2. Rekening Pemerintah	81
F.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak	82
F.2.4. Penerimaan Hibah Luar Negeri	82
F.2.5. Perjanjian Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional	83
F.2.6. Hasil Inventaris Aset	84
F.2.7. Transaksi Resiprokal	84
F.2.8. Program Prioritas Nasional Tahun 2025	85
F.2.9. Capaian Output Strategis	86

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Kriteria Kualitas Piutang	13
Tabel 2 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 3 : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 4 : Perincian Perubahan DIPA untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	18
Tabel 5 : Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	19
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	20
Tabel 7 : Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	26
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	26
Tabel 9 : Perbandingan Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	27
Tabel 10 : Perbandingan Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	28
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	29
Tabel 12 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	30
Tabel 13 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	31
Tabel 14 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	32
Tabel 15 : Perincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025	35
Tabel 16 : Perincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	36
Tabel 17 : Perincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2025	37
Tabel 18 : Perincian Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	37
Tabel 19 : Perincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025	40
Tabel 20 : Perincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025	45
Tabel 21 : Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	47
Tabel 22 : Perincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025	48

Tabel 23	: Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025	49
Tabel 24	: Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud per per 31 Desember 2025	50
Tabel 25	: Perincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025	51
Tabel 26	: Perincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025	51
Tabel 27	: Perincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per per 31 Desember 2025	53
Tabel 28	: Perincian Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025	54
Tabel 29	: Perincian Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	57
Tabel 30	: Perincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	60
Tabel 31	: Perincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	61
Tabel 32	: Perincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	62
Tabel 33	: Perincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	63
Tabel 34	: Perincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	64
Tabel 35	: Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	65
Tabel 36	: Perincian Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024	66
Tabel 37	: Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	73
Tabel 38	: Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	74
Tabel 39	: Perincian Atas Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	74
Tabel 40	: Perincian Atas Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	75
Tabel 41	: Perincian Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	76
Tabel 42	: Perincian Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	76

Tabel 43	: Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama BPOM Tahun Anggaran 2025	80
Tabel 44	: Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Utama BPOM Tahun Anggaran 2025	81
Tabel 45	: Rekening Pemerintah	82
Tabel 46	: Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan Operasional	83
Tabel 47	: Perincian Transaksi Resiprokal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025	84
Tabel 48	: Prioritas Nasional	86

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Rekapitulasi Revisi DIPA Sekretariat Utama BPOM TA 2025
- Lampiran 2 : Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
- Lampiran 3 : Perincian Pengembalian Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
- Lampiran 4 : Perincian Pengembalian Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
- Lampiran 5 : Perincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- Lampiran 6 : Perincian Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan
- Lampiran 7 : Perincian Belanja Dibayar Dimuka
- Lampiran 8 : Rekapitulasi Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar
- Lampiran 9 : Perincian Pendapatan Diterima Dimuka
- Lampiran 10 : Tindak Lanjut Temuan BPK
- Lampiran 11 : Capaian Output

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Utama BPOM yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan 2025 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretariat Utama BPOM



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M. Si

NIP. 196904031995031001

RINGKASAN

Laporan Keuangan Sekretariat Utama BPOM TA 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp474.401.407,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp681.260.064.644,00 atau mencapai 87,50% dari alokasi anggaran sebesar Rp778.590.550,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp878.395.260.634,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp45.140.411.585,00; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp829.790.192.705,00; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp3.464.656.344,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.865.504.696,00 dan Rp874.529.755.938,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan

Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp155.540.583,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp665.620.481.807,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp665.464.941.224,00. Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp283.262.057,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit- LO sebesar Rp665.748.203.281,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp819.028.921.835,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp665.748.203.281,00 kemudian ditambah koreksi yang mengurangi nilai ekuitas senilai Rp1.078.716.528,00 dan transaksi antar entitas senilai total Rp722.327.753.912,00 sehingga Ekuitas entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah senilai Rp874.529.755.938,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk TA 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT UTAMA BPOM
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025				31 DESEMBER 2024
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DIBAWAH)	%	REALISASI
PENDAPATAN						
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	0,00	474.401.407,00	474.401.407,00	-	474.049.148,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	474.401.407,00	474.401.407,00	-	474.049.148,00
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	599.370.602.000,00	593.491.939.419,00	(5.878.662.581,00)	99,02	237.416.011.985,00
Belanja Barang	B.2.2	177.004.280.000,00	85.582.807.922,00	(91.421.472.078,00)	48,35	162.499.390.225,00
Belanja Modal	B.2.3	2.215.668.000,00	2.185.317.303,00	(30.350.697,00)	98,63	7.511.449.027,00
JUMLAH BELANJA		778.590.550.000,00	681.260.064.644,00	(97.330.485.356,00)	87,50	407.426.851.237,00

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
 Sekretaris Utama Badan POM



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M. Si
 NIP. 196904031995031001

II. NERACA

**SEKRETARIAT UTAMA BPOM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1	41,650,000,000.00	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1.2	1,974,485,647.00	1,895,628,632.00
Bagian Lancar Tagihan-Bagian Lancar	C.1.3	15,200,000.00	0.00
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	C.1.4	(76,000.00)	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian	C.1.5	15,124,000.00	0.00
Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.6	1,500,801,938.00	1,590,912,863.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN			
PERBENDAHARAAN/TGR (NETTO)			
Persediaan			
JUMLAH ASET LANCAR		45,140,411,585.00	3,486,541,495.00
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	619,414,000,000.00	619,414,000,000.00
Peralatan dan Mesin	C.2.2	118,937,734,919.00	120,776,460,236.00
Gedung dan Bangunan	C.2.3	256,847,600,783.00	250,211,245,569.00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	0.00	2,652,019,735.00
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	352,783,472.00	853,791,382.00
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2.6	0.00	4,155,302,624.00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.7	(165,761,926,469.00)	(149,739,651,646.00)
JUMLAH ASET TETAP		829,790,192,705.00	848,323,167,900.00
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	4,633,408,000.00	4,831,513,300.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.3.2	3,377,821,317.00	3,712,267,551.00
Aset Lain-Lain	C.3.3	45,649,324.00	0.00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset	C.3.4	(4,592,222,297.00)	(4,686,572,980.00)
Lainnya			
JUMLAH ASET LAINNYA		3,464,656,344.00	3,857,207,871.00
JUMLAH ASET		878,395,260,634.00	855,666,917,266.00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	3,815,744,705.00	36,524,277,424.00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2	49,759,991.00	113,718,007.00
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK		3,865,504,696	36,637,995,431
JUMLAH KEWAJIBAN		3,865,504,696	36,637,995,431
EKUITAS			
Ekuitas	C.5	874,529,755,938.00	819,028,921,835.00
JUMLAH EKUITAS		874,529,755,938.00	819,028,921,835.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		878,395,260,634.00	855,666,917,266.00

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Utama BPOM



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si
NIP. 19690403 199503 1 001

III. LAPORAN OPESIONAL

SEKRETARIAT UTAMA BPOM
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	155.540.583,00	96.875.285,00
JUMLAH PENDAPATAN		155.540.583,00	96.875.285,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	560.182.932.330,00	269.593.572.072,00
Beban Persediaan	D.3	1.113.500.960,00	1.568.711.285,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	64.635.556.606,00	83.771.053.887,00
Beban Pemeliharaan	D.5	9.709.341.398,00	18.424.513.567,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.040.037.923,00	57.451.106.433,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	19.947.763.863,00	22.600.324.725,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(8.651.273,00)	0,00
JUMLAH BEBAN		665.620.481.807,00	453.409.281.969,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(665.464.941.224,00)	(453.312.406.684,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		(398.896.394,00)	110.904.000,00
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		262.393.680,00	137.964.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		661.290.074,00	27.060.000,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		115.634.337,00	182.117.838,00
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		115.634.337,00	189.667.838,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	7.550.000,00
JUMLAH SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(283.262.057,00)	293.021.838,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.9	(665.748.203.281,00)	(453.019.384.846,00)
POS LUAR BIASA	D.10		
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(665.748.203.281,00)	(453.019.384.846,00)

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran
Sekretariat Utama Badan POM



Anton Tarigan
Dr. Ir. Antonius Tarigan, M. Si
NIP. 196904031995031001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT UTAMA BPOM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
EKUITAS AWAL	E.1	819.028.921.835,00	912.112.873.100,00
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(665.748.203.281,00)	(453.019.384.846,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(1.078.716.528,00)	10.514.273,00
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	0,00	0,00
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	0,00	0,00
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.3	1.332.000,00	0,00
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	0,00	0,00
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.5	(150.919.734,00)	10.514.273,00
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	(929.128.794,00)	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	722.327.753.912,00	359.924.919.308,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		55.500.834.103,00	(93.083.951.265,00)
EKUITAS AKHIR	E.5	874.529.755.938,00	819.028.921.835,00

Jakarta, 4 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran

Sekretariat Utama BPOM



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

NIP. 19690403 199503 1 001

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Akuntansi Sekretariat Utama BPOM

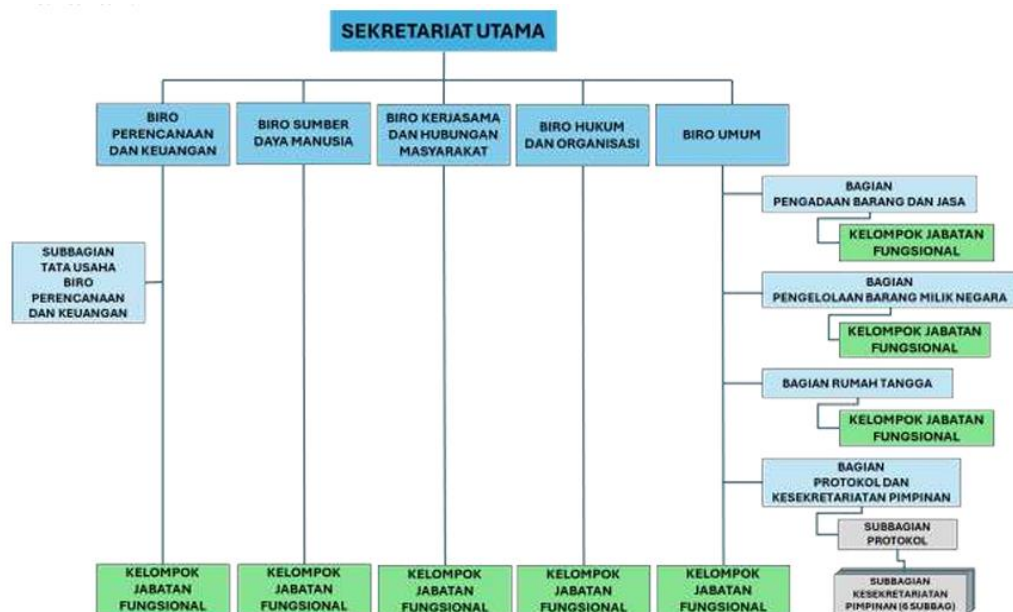
*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Akuntansi
Sekretariat
Utama BPOM*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Sekretariat Utama berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM. Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. koordinasi kegiatan BPOM;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bagan Sekretariat Utama BPOM



Dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, Satker Sekretariat Utama BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung untuk Renstra 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera Bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045”

Misi BPOM sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku

kepentingan.

- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Utama BPOM. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Sekretariat Utama BPOM menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan perubahannya.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Utama BPOM dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan TA 2025 *Audited* telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Keputusan Kepala BPOM Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Persediaan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPOM yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Utama BPOM. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN)
- Akuntansi Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - (2) Pendapatan – LO
LO

- Pendapatan-LO adalah hal pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar Kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/ atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Sekretariat Utama BPOM adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode sewa;
 - Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah;
 - Pendapatan dari Penjualan dan Mesin;
 - Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya;
 - Pendapatan Setoran dari Sisa Utang non TP/TGR Pensiunan PNS; dan
 - Penerimaan Kembali Belanja TAYL.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan hruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber.

Belanja (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Negara (KUN).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan program akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 1
Kriteria Kualitas Piutang

kualitas piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. Tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.

- Persediaan merupakan aset yang berupa:
 1. Barang Konsumsi, dan;
 2. Bahan untuk Pemeliharaan.
- Persediaan disajikan sebesar :
 1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a. Harga pembelian;
 - b. Biaya pengangkutan;
 - c. Biaya penanganan;
 - d. Biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan termasuk pajak.
 Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
 - a. Potongan harga;
 - b. Rabat dan lainnya yang serupa.
 2. Harga Pokok Produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga Pokok Produksi (HPP) terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan dengan secara sistematis
 3. Nilai Wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lain seperti donasi yang tidak diperoleh harga perolehannya. Nilai wajar yang dimaksud dapat menggunakan harga pasar atau estimasi yang ditentukan oleh BPOM.

*Aset Tetap***b. Aset Tetap**

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan public yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sesuai PMK nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap***c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;

- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266/KM.6/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (alat musik modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi

penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Amortisasi ATB masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada entitas Pemerintah Pusat. Di BPOM Amortisasi yang ada yaitu Software Komputer dengan masa manfaat selama 4 tahun.

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sekretariat Utama BPOM memperoleh alokasi anggaran TA 2025 sebesar Rp674.848.879.000,00. Selama periode TA 2025, Sekretariat Utama telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 17 kali dari DIPA awal yang disebabkan oleh adanya program Automatic Adjustment dari Pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Penjelasan atas revisi tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

Anggaran awal dan anggaran setelah revisi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4
Perincian Perubahan DIPA
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian		TA 2025		Perubahan
		Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi	
PENDAPATAN				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00
BELANJA				
1.	Belanja Pegawai	498.978.976.000,00	599.370.602.000,00	100.391.626.000,00
2.	Belanja Barang	172.339.643.000,00	177.004.280.000,00	4.664.637.000,00
3.	Belanja Modal	3.530.260.000,00	2.215.668.000,00	(1.314.592.000,00)
	Jumlah Belanja	674.848.879.000,00	778.590.550.000,00	103.741.671.000,00

Kenaikan dan penurunan anggaran per masing-masing Belanja dan Pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp100.391.626.000,00 dikarenakan adanya perubahan revisi anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan gaji PPPK, gaji CPNS dan Tunjangan Kinerja Terpusat.
2. Belanja Barang mengalami kenaikan sebesar Rp4.664.637.000,00 dikarenakan untuk menunjang kebutuhan belanja operasional dalam rangka pelaksanaan tupoksi satker.
3. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp1.314.592.000,00 dikarenakan adanya pemblokiran mandiri (*selfblocking*) sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN.

Realisasi Pendapatan
Rp474.401.407,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp474.401.407,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Perincian estimasi dan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	Kode Akun	Uraian	Estimasi	Realisasi 31 Desember 2025	%
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	28.290.180,00	-
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	234.103.500,00	-
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	66.038.273,00	-
4	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	8.727.273,00	-
5	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	25.544.294,00	-
6	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	42.727.512,00	-
7	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	1.088.205,00	-
8	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0,00	11.263.550,00	-
9	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	56.618.620,00	-
Jumlah Bruto			0,00	474.401.407,00	-
Pengembalian			0,00	0,00	-
Pendapatan Netto			0,00	474.401.407,00	-

Realisasi Pendapatan Sekretariat Utama BPOM yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,07% dibandingkan dengan realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pemindahtanganan BMN Lainnya, pendapatan denda atas kekurangan volume pekerjaan pemerintah dan pendapatan atas setoran kas negara dari sisa utang non TP/TGR Pensiunan/PNS.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

No	MAK	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
1	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	28.290.180,00	94.051.000,00	(69,92)
2	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	234.103.500,00	43.913.000	433,11
3	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	66.038.273,00	103.346.500	(36,10)
4	425791	Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	8.727.273,00	0,00	-
5	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian pekerjaan Pemerintah	25.544.294,00	11.181.920	128,44
6	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	42.727.512,00	96.048.819	(55,51)
7	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	1.088.205,00	87.619.019	(98,76)
8	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	11.263.550,00	31.888.890	(64,68)
9	425931	Pendapatan Setoran Dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	56.618.620,00	6.000.000	843,64
Jumlah Bruto			474.401.407,00	474.049.148,00	0,07

Perincian realisasi pendapatan sebesar Rp474.401.407,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.290.180,00 berupa lelang barang inventaris sesuai risalah lelang nomor RL-131/07.04/2025-01 tanggal 14 Juli 2025 dengan NTPN 3E4322G5035011OI tanggal 14 Juli 2025.
2. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp234.103.500,00, terdiri dari :
 - a. Pendapatan hasil lelang sebesar Rp 97.565.000,00 berupa 1 paket barang inventaris kantor dalam kondisi scrap sesuai risalah lelang nomor: RL-22/07.04/2025-01 tanggal 3 Februari 2025 dengan NTPN 3D94C6U8F7HPVJOU tanggal 6 Februari 2025;
 - b. Pendapatan hasil Lelang sebesar Rp126.000.000,00 berupa 1 unit kendaraan roda 4 sesuai risalah Lelang nomor RL.28/07.04/2025 tanggal 6 Februari 2025 dengan NTPN 40D503CIFT88F60T tanggal 7 Februari 2025;
 - c. Pendapatan hasil lelang sebesar Rp10.538.500,00 berupa 1 paket barang inventaris kantor dalam kondisi rusak berat sesuai risalah Lelang nomor RL-331/07.04/2025-01 tanggal 16 Desember 2025 dengan NTPN 65FE548VVOOPN5R6 tanggal 18 Desember 2025.
3. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan sebesar Rp66.038.273,00, terdiri dari:
 - a. Pendapatan pembayaran keterlambatan sewa kantin Pikoelan bulan September 2024 sebesar Rp5.423.334,00 berdasarkan addendum kontrak nomor PL.03.06.25.03.25.01 dan nomor 04/KOPERPOM/III/25 tanggal 7 Maret 2025 sesuai NTPN 021301JNG86EV33T tanggal 7 Maret 2025;

- b. Pendapatan sewa ATM BRI sebesar Rp19.152.000,00 untuk periode sewa dari tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 24 Juni 2026 berdasarkan kontrak nomor PL.03.06.25.06.25.04 tanggal 25 Juni 2025 sesuai NTPN 59DCE3CIFTKMKSOQ tanggal 25 Juni 2025;
 - c. Pendapatan sewa kantin Mezanin sebesar Rp19.058.697,00 untuk periode sewa dari tanggal 28 November 2025 sampai dengan 27 November 2026 berdasarkan kontrak nomor PL.03.06..25.12.25.06 tanggal 28 November 2025 sesuai NTPN 2C2E348VVOM0F0Q6 tanggal 28 November 2025.
 - d. Pendapatan sewa kantin Pikoelan Lantai 2 sebesar Rp13.876.500,00 untuk periode sewa dari tanggal 15 Desember 2025 sampai dengan 14 Desember 2026 berdasarkan kontrak nomor PL.03.06.25.12.25.08 tanggal 15 Desember 2025 sesuai NTPN 8E2177QLV324JELO tanggal 15 Desember 2025.
 - e. Pendapatan atas keterlambatan sewa kantin Pikoelan sebesar Rp8.527.742,00 untuk sewa tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 14 Desember 2025 berdasarkan adendum kontrak nomor AdendumPL.03.06.25.01.26.01 tanggal 7 Desember 2025 sesuai NTPN 2038F2G503K5AKOC tanggal 24 Desember 2025
4. Pendapatan Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebesar Rp8.727.273,00 yang berasal dari piutang pegawai karena mengundurkan diri dari CPNS/PNS sebelum waktu yang ditetapkan an. Wiwit Suwatini Yuniasih, sesuai SP3N-676/PUPNC.10.04/2009 dan ND-100/KNL.070303/2025, dengan NTPN 837431JNG842FPFF tanggal 26 Februari 2025.

5. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah sebesar Rp25.544.294,00 terdiri dari :
 - a. Pendapatan denda sebesar Rp23.411.394,00 yang berasal dari keterlambatan pekerjaan atas pengadaan Tangga Darurat Gedung Athena sesuai SPM Nomor 00271T tanggal 19 Februari 2025 dan SP2D Nomor 259991302006487 tanggal 20 Februari 2025;
 - b. Pendapatan denda sebesar Rp1.963.500,00 yang berasal dari keterlambatan pekerjaan atas jasa konsultan pengawas Pembangunan tangga darurat Gedung Athena sesuai SPM Nomor 00336T tanggal 21 Februari 2025 dan SP2D Nomor 259991302006501 tanggal 21 Februari 2025;
 - c. Pendapatan denda sebesar Rp169.400,00 yang berasal dari keterlambatan pekerjaan atas perlengkapan pengadaan cleaning service an. Rauna Swantantra Prakasa sesuai NTPN 6BBAE0NA0EBT7EAA tanggal 07 November 2025.
6. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp42.727.512,00 merupakan penerimaan atas potongan akun belanja pegawai atas pembulatan gaji, tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja, perincian dapat dilihat pada lampiran 2.
7. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1.088.205,00 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	No. Dokumen	Tgl. Dokumen	Nilai
1	Pengembalian PD Surakarta dan Yogyakarta an Chairani dkk	60DD261QVCSN5S1B	45673	118.000,00
2	Pengembalian PD Tarakan dan Mataram an Jayadi dkk (ROUM)	8CEA93CIFT5HURR4	45673	300.000,00
3	Pengembalian PD Surakarta dan Yogyakarta an Prima S dkk	A6E980NA0DECNS7P	45673	229.250,00
4	Pengembalian PD Tasikamalaya dan Bandung an Henri Agus K. dkk	E090F55DFIAAOST8	45673	440.955,00
TOTAL				1.088.205,00

8. Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL karena adanya kekurangan pada volume pekerjaan sebesar Rp11.263.550,00 , terdiri dari:
- Penerimaan sebesar Rp6.839.900,00 merupakan pengembalian belanja atas renovasi Ruang TPA an. PT. Alfa Caya Alam dengan NTPN 20C2C61QVD8DLD5T tanggal 8 Mei 2025;
 - Penerimaan sebesar Rp1.735.500,00 merupakan pengembalian belanja atas pekerjaan renovasi Creavity Zone an. PT. Guna Mandiri Selaras NTPN 9EB6D0NA0DQ37DQ5 tanggal 9 Mei 2025;
 - Penerimaan sebesar Rp2.688.150,00 merupakan pengembalian belanja atas pekerjaan renovasi Ruang Rapat dan TU Sestama an. PT. Tria Makri Dinamika dengan NTPN 68A9F6U8F7QQ2DVP tanggal 8 Mei 2025.
9. Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan/PNS sebesar Rp56.618.620,00 dengan penjelasan sebagai berikut:
- Terdapat pendapatan atas setoran kas negara non KAI dari PT. Taspen Persero sebesar Rp52.562.520,00 dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	NTPN	Tgl. Dokumen	Nilai
1	Setoran bulan Januari 2025	E30AC7QLV219DFN2	10 Januari 2025	500.000,00
2	Setoran bulan Februari 2025	7DB1655DFID2DFRR	10 Februari 2025	500.000,00
3	Setoran bulan Maret 2025	F066D6U8F7KPE26B	10 Maret 2025	500.000,00
4	Setoran bulan April 2025	51E5661QVD5F2R8I	10 April 2025	32.335.520,00
5	Setoran bulan Mei 2025	6175255DFIM19L45	09 Mei 2025	300.000,00
6	Setoran bulan Juni 2025	BDF6861QVDB8VKL2	10 Juni 2025	300.000,00
7	Setoran bulan Juli 2025	D94482G5034RE2C9	10 Jul 2025	300.000,00
8	Setoran bulan Agustus 2025	E582F55DFIUST7T8	8 Aug 2025	300.000,00
9	Setoran bulan September 2025	118587QLV2P37JNQ	10 Sep 2025	148.400,00
10	Setoran bulan Oktober 2025	092BF8N3ETEF2CD	10 Oct 2025	17.378.600,00
TOTAL				52.562.520,00

- b. Terdapat pendapatan atas setoran kas negara sebesar Rp4.056.100,00 berupa setoran pengembalian gaji november 2024 NIP 199203072015021002 an. RIZKY EKA WIJAYA, berdasarkan SK BPOM No. KP.09.03.1.2.12.24.93 Tahun 2024 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS NTPN CC16F0NA0DKFTN6J tanggal 21 Maret 2025.

Realisasi Belanja

Rp681.260.064.644,00

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp681.260.064.644,00 atau 87,50% dari anggaran belanja sebesar Rp778.590.550.000,00. Selama Tahun Anggaran 2025, anggaran yang diblokir sebesar Rp91.403.553.000,00 sehingga persentase realisasi anggaran terhadap pagu efektif sebesar 99,14%. Perincian anggaran dan realisasi belanja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Perincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	599.370.602.000,00	593.595.706.108,00	99,04
Belanja Barang	177.004.280.000,00	85.634.057.064,00	48,38
Belanja Modal	2.215.668.000,00	2.185.317.303,00	98,63
Total Belanja Kotor	778.590.550.000,00	681.415.080.475,00	87,52
Pengembalian	0,00	155.015.831,00	-
Jumlah	778.590.550.000,00	681.260.064.644,00	87,50

Realisasi belanja pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp273.833.213.407,00 atau 67,21% dibandingkan periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan belanja secara umum dikarenakan adanya perubahan revisi anggaran belanja pegawai dalam rangka pemenuhan kebutuhan gaji PPPK, gaji CPNS dan Tunjangan Kinerja Terpusat.

Perbandingan Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Pegawai	593,491,939,419.00	237,416,011,985.00	149.98
Belanja Barang	85,582,807,922.00	162,499,390,225.00	(47.33)
Belanja Modal	2,185,317,303.00	7,511,449,027.00	(70.91)
Jumlah	681,260,064,644.00	407,426,851,237.00	67.21

*Belanja Pegawai**Rp593.491.939.419,00****B.2.1 Belanja Pegawai***

Realisasi Belanja Pegawai Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp593.491.939.419,00 dan Rp237.416.011.985,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp356.075.927.434,00 atau 149,98% bila dibandingkan dengan realisasi belanja untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024. Kenaikan ini disebabkan adanya peralihan mekanisme pembayaran tunjangan kinerja dilingkungan BPOM yang semula dibebankan kepada DIPA masing-masing satuan kerja menjadi terpusat di Satker Sekretariat Utama BPOM sesuai Surat Edaran Kepala Biro SDM Nomor B-KU.02.03.24.330 tanggal 22 Mei 2024. Perincian belanja Pegawai disajikan sebagai berikut :

Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	118.249.840.575,00	89.179.314.334,00	32,60
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	18.582.185.790,00	12.613.969.686,00	47,31
Belanja Lembur	718.927.000,00	1.113.176.000,00	(35,42)
Belanja Tunjangan Khusus	456.044.752.743,00	135.329.697.315,00	236,99
Jumlah Belanja Kotor	593.595.706.108,00	238.236.157.335,00	149,16
Pengembalian Belanja Pegawai	103.766.689,00	820.145.350,00	(87,35)
Jumlah Belanja	593.491.939.419,00	237.416.011.985,00	149,98

Pengembalian Belanja Pegawai pada satker Sekretariat Utama BPOM disebabkan adanya perubahan status pegawai, tugas belajar, kesalahan potongan kehadiran dan penyesuaian tunjangan kinerja karena kenaikan jabatan. Adapun Perincian Pengembalian Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp103.766.689,00 dapat dilihat pada lampiran 3.

Belanja Barang

Rp85.582.807.922,00

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp85.582.807.922,00 dan Rp162.499.390.225,00. Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp76.916.582.303,00 atau 47,33% dari 2024 dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja barang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	15.593.820.114,00	25.491.232.529,00	(38,83)
Belanja Barang Non Operasional	5.928.748.531,00	14.108.312.609,00	(57,98)
Belanja Barang Persediaan	1.014.424.675,00	1.663.064.660,00	(39,00)
Belanja Jasa	43.288.817.607,00	45.357.857.823,00	(4,56)
Belanja Pemeliharaan	9.724.406.758,00	18.443.128.171,00	(47,27)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.115.428.697,00	52.413.674.015,00	(84,52)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.968.410.682,00	5.430.169.519,00	(63,75)
Jumlah Belanja Kotor	85.634.057.064,00	162.907.439.326,00	(47,43)
Pengembalian Belanja	51.249.142,00	408.049.101,00	100,00
Belanja Netto	85.582.807.922,00	162.499.390.225,00	(47,33)

Pengembalian Belanja Barang pada satker Sekretariat Utama BPOM dikarenakan adanya kelebihan pembayaran melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) atas belanja honor operasional satker, belanja bahan, belanja jasa profesi dan belanja perjalanan dinas. Adapun Perincian Pengembalian Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp51.249.142,00 dapat dilihat pada lampiran 4.

Belanja Modal
Rp2.185.317.303,00

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.185.317.303,00 dan Rp7.511.449.027,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp5.326.131.724,00 atau 70,91% dibandingkan pada 31 Desember 2024 yang dikarenakan oleh adanya pemblokiran mandiri (*selfblocking*) sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,473,768,653.00	4,075,041,830.00	(63.83)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	661,553,650.00	2,808,514,197.00	(76.44)
Belanja Modal Lainnya	49,995,000.00	627,893,000.00	(92.04)
Jumlah Belanja Kotor	2,185,317,303.00	7,511,449,027.00	(70.91)
Pengembalian	0.00	0.00	-
Jumlah Belanja	2,185,317,303.00	7,511,449,027.00	(70.91)

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp1.473.768.653,00

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.473.768.653,00 dan Rp4.075.041.830,00. Belanja modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.601.273.177,00 atau 63,83% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan oleh adanya kebijakan pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka efisiensi belanja APBN sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal peralatan mesin adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,468,990,053.00	4,075,041,830.00	(63.95)
Belanja Penambahan Nila Peralatan dan Mesin	4,778,600.00	0.00	-
Jumlah Belanja Kotor	1,473,768,653.00	4,075,041,830.00	(63.83)
Pengembalian	0.00	0.00	-
Jumlah Belanja	1,473,768,653.00	4,075,041,830.00	(63.83)

Adapun Penjelasan atas Realisasi Belanja Modal dan Peralatan Mesin sebesar Rp1.473.768.653,00 adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.468.990.053,00 perinciannya dapat dilihat pada lampiran 5.
- b. Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin senilai Rp4.778.600 berupa Tablet PC sesuai dengan SP2D nomor 259991320154001 tanggal 23 Juli 2025.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp661.553.650,00

B.2.3.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp661.553.650,00 dan Rp2.808.514.197,00. Belanja modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.146.960.547,00 atau 76,44% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka efisiensi belanja APBN sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	181,128,024	(100.00)
Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	661,553,650.00	2,627,386,173.00	(74.82)
Jumlah Belanja Kotor	661,553,650.00	2,808,514,197.00	(76.44)
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	-
Jumlah Belanja	661,553,650.00	2,808,514,197.00	(76.44)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp661.553.650,00 yang berasal dari penambahan nilai gedung dan bangunan dapat dilihat perinciannya pada lampiran 6.

Belanja Modal Lainnya Mesin Rp49.995.000,00

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp49.995.000,00 dan Rp627.893.000,00. Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp577.898.000,00 atau 92,04% bila dibandingkan dengan realisasi

Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan pemblokiran mandiri (*selfblocking*) dalam rangka efisiensi belanja APBN sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Adapun perincian perbandingan realisasi belanja modal lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	%
Belanja Modal Lainnya	0.00	79,365,000	(100.00)
Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	49,995,000.00	548,528,000.00	(90.89)
Jumlah Belanja Kotor	49,995,000.00	627,893,000.00	(92.04)
Pengembalian Belanja Modal	0.00	0.00	-
Jumlah Belanja	49,995,000.00	627,893,000.00	(92.04)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp49.995.000,00 yang berasal dari penambahan nilai aset tetap lainnya dan/atau aset berupa pengembangan Aplikasi RHPK berdasarkan diterbitkannya SP2D nomor 259991311212932 tanggal 2 Desember 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar

Rp45.140.411.585,00

C.1. Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Sekretariat Utama BPOM per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp45.140.411.585,00 dan Rp3.486.541.495,00.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kas Lainnya Setara Kas Rp

41.650.000.000,00

C.1.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp41.650.000.000,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Kas Lainnya dan Setara Kas pada satker Sekretariat Utama BPOM sebesar Rp41.650.000.000,00 merupakan dana hibah *Gates Foundation* sesuai agreement nomor INV-094868 tanggal 2 Desember 2025 yang diterima secara bertahap dimana pada tahap pertama ditransfer pada tanggal 22 Desember 2025 ke rekening penampung hibah langsung dengan nama rekening RPL 140 PDHL BPOM , nomor register 2DNA9Q7A dan nomor rekening 2228255583. Namun sampai dengan 31 Desember 2025 dana hibah belum dimanfaatkan karena masih dalam proses penyesuaian rencana kegiatan. Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai TA 2026, sehingga saldo masih tersaji sebagai kas lainnya dan setara kas.

Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Rp1.974.485.647,00

C.1.2. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.974.485.647,00 dan Rp1.895.628.632,00.

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran TA berjalan namun barang atau

belum diterima seluruhnya. Perincian Belanja Dibayar Dimuka dapat dilihat pada lampiran 7.

*Bagian Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi
Rp15.200.000,00*

C.1.3. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan bagian dari piutang TP/TGR yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp15.200.000,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan tagihan atas kerugian negara yang disebabkan oleh hilangnya Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor yang menjadi tanggung jawab Sdri.Caroline Bening Pramudya sesuai Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tanggal 29 Desember 2025. sampai dengan tanggal pelaporan, proses pengesahan penetapan Tuntutan Ganti Rugi masih dalam tahap pembahasan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) BPOM. Namun demikian, berdasarkan komitmen penyelesaian melalui mekanisme pembayaran secara angsuran sebanyak 10 (sepuluh) kali cicilan, piutang tersebut diklasifikasikan sebagai bagian lancar. Sehubungan dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan TA 2025 *unaudited*, satker telah menindaklanjuti dengan melakukan pencatatan melalui jurnal manual pada aplikasi SAKTI.

*Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih-Bagian Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi Rp76.000,00*

C.1.4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp76.000,00 dan Rp0,00.

Penyisihan tersebut merupakan estimasi atas kemungkinan tidak tertagihnya piutang yang dihitung berdasarkan kualitas piutang.

*Bagian Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan
Ganti Rugi (Netto)
Rp15.124.000,*

C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto) per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp15.124.000,00 dan Rp0,00.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) (Netto) merupakan nilai Bagian Lancar TP/TGR setelah dikurangi dengan penyisihan piutang tidak tertagih.

*Persediaan
Rp1.500.801.938,00*

C.1.6. Persediaan

Nilai Persediaan pada per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.500.801.938,00 dan Rp1.590.912.863,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Perincian Persediaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 15

Perincian Mutasi Persediaan per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	1.590.912.863,00
Mutasi tambah :	1.151.147.815,00
Mutasi Kurang :	(1.241.258.740,00)
Saldo per 31 Desember 2025	1.500.801.938,00

Tabel 16

*Perincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024**(dalam rupiah)*

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	1,468,754,114.00	1,544,480,479.00
2	Barang Untuk Pemeliharaan	32,047,824.00	46,432,384.00
Jumlah		1,500,801,938.00	1,590,912,863.00

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Total nilai persediaan yang dalam rusak/usang adalah sebesar Rp0,00 dan telah dilakukan stock opname per 31 Desember 2025 sesuai dengan Berita Acara Stock Opname nomor PL.03.10.25.25.12.25.10.

*Aset Tetap**Rp829.790.192.705,00***C.2. Aset Tetap**

Saldo Aset Tetap Sekretariat Utama BPOM per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp829.790.192.705,00 dan Rp848.323.167.900,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Sekretariat Utama BPOM berupa, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

*Tanah**Rp619.414.000.000,00***C.2.1. Tanah**

Tanah yang dimiliki oleh Sekretariat Utama BPOM per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp619.414.000.000,00 dan Rp619.414.000.000,00.

Perincian Aset Tetap Tanah Sekretariat Utama BPOM per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
Perincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	619.414.000.000,00
Mutasi tambah :	0,00
Mutasi Kurang :	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	619.414.000.000,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025	619.414.000.000,00

Adapun rincian Tanah pada satuan Kerja Sekretariat Utama BPOM adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Kode BMN	Nama Barang	Lokasi	Luas (m2)	Nilai	Keterangan
1	Sekretariat Utama BPOM	2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Percetakan Negara No. 23, Johar Baru, Jakarta Pusat	28.430	619.414.000.000	Sertifikat Hak Pakai No. 108
Total					28.430	619.414.000.000	

Peralatan dan Mesin
Rp118.937.734.919,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah Rp118.937.734.919,00 dan Rp120.776.460.236,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 18
Perincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		120.776.460.236,00
Mutasi tambah:		2.414.732.393,00
Pembelian	1.468.990.053,00	
Transfer masuk	143.404.350,00	
Reklasifikasi Masuk	797.559.390,00	
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	4.778.600,00	
Mutasi kurang:		(4.253.457.710,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.679.977.657,00)	
Reklasifikasi Keluar	(797.559.390,00)	
Transfer Keluar	(1.775.920.663,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		118.937.734.919,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(104.815.991.940,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		14.121.742.979,00

Transaksi Mutasi Tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.414.732.393,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembelian sebesar Rp1.468.990.053,00 berupa:

No	Uraian	Unit	Nilai
1	ALAT BANTU	1	12.698.400,00
2	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	5	48.266.501,00
3	PERALATAN KOMPUTER	72	839.997.461,00
4	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	107	568.027.691,00
	Total	185	1.468.990.053,00

2. Transfer Masuk sebesar Rp143.404.350,00 yang diterima oleh Satker Sekretariat Utama BPOM dari beberapa satker dengan perincian sebagai berikut :

No	Satker Pengirim	Nomor BAST	Tanggal	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai
1	Pusdatin	PL.03.07.8.04.25.41	15 Mei 2025	Note Book	373	1	17.125.000,00
2	Pusakom	PL.03.04.14.05.24.334	20 Mei 2025	Note Book	70	1	35.200.000,00
3	Deputi II	PL.03.07.42.06.25.07	05 Juni 2025	Tablet PC	5	1	7.549.850,00
				Laptop	348	1	13.850.000,00
4	Deputi III	PL.03.03.51,12,25,2322	2 Desember 2025	Lemari Kayu	33	1	11.500.000,00
				Lemari Kayu	36	1	27.157.500,00
				Lemari Kayu	38	1	10.010.000,00
				Lemari Kayu	59	1	21.012.000,00
Total						8	143.404.350,00

3. Reklasifikasi masuk sebesar Rp797.559.390,00 dijelaskan sebagai berikut:

Reklasifikasi Keluar				Reklasifikasi Masuk				
No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan	Nilai
1	3100102003	Note Book	745 - 761	3100102001	P.C Unit	1154 - 1159	PL.03.02.25.07.25.100 tanggal 10 Juli 2025	88,140,000.00
2	3100102003	Note Book	603 - 604	3100102001	P.C Unit	1161 - 1162	PL.03.02.25.08.25.123 tanggal 05 Agustus 2025	38,800,000.00
3	3050205019	Mixer	1 - 5	3060101098	Mixer Sound System	1 - 5	PL.03.01.25.09.25.134 tanggal 01 Sept 2025	92,273,970.00
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	1883-1884, 1886-1888, 1890	3050102033	Sofa	66 - 71	PL.03.02.25.10.25.155 tanggal 14 Oktober 2025	9,900,000.00
5	3050104001	Lemari Besi/Metal	526-530, 532-539, 541	3050104002	Lemari Kayu	617 - 628	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	170,317,620.00
6	3060101005	Amplifier	21 - 52	3050206014	Microphone	114 - 145	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	349,976,000.00
7	3080133010	Exhaust Fan (Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	16 - 17	3050204007	Exhaust Fan	102 - 10	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	8,802,300.00
8	3080602046	Air Purifier	1 - 2	3050203005	Air Cleaner	2 - 3	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	39,349,500.00
Total								797,559,390.00

4. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp4.778.600,00 merupakan pembelian keyboard pengembangan Tablet PC NUP 13. Transaksi Mutasi Kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.253.457.710,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp1.679.977.657,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Kuantitas	Nilai	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan
1	1	73.000.000,00	PL.03.09.25.04.25.96	22 April 2025	Izuzu Panter Ambulance Putih NUP 197 dengan kondisi Rusak Berat
2	101	693.990.571,00	PL.03.07.25.11.25.189	17 November 2025	Peralatan dan Mesin dengan kondisi Rusak Berat
3	106	893.087.762,00	PL.03.07.25.11.25.188	18 November 2025	Peralatan dan Mesin dengan kondisi Rusak Berat
4	1	19.899.324,00	PL.03.09.25.12.25.22	31 Desember 2025	Sepeda Motor NUP 70
TOTAL	209	1.679.977.657,00			

2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp797.559.390 dijelaskan sebagai berikut:

Reklasifikasi Keluar				Reklasifikasi Masuk				
No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan	Nilai
1	3100102003	Note Book	745 - 761	3100102001	P.C Unit	1154 - 1159	PL.03.02.25.07.25.100 tanggal 10 Juli 2025	88.140.000,00
2	31001002003	Note Book	603 - 604	3100102001	P.C Unit	1161 - 1162	PL.03.02.25.08.25.123 tanggal 05 Agustus 2025	38.800.000,00
3	3050205019	Mixer	1 - 5	3060101098	Mixer Sound System	1 - 5	PL.03.01.25.09.25.134 tanggal 01 Sept 2025	92.273.970,00
4	3050201002	Meja Kerja Kayu	1883-1884, 1886-1888, 1890	3050102033	Sofa	66 - 71	PL.03.02.25.10.25.155 tanggal 14 Oktober 2025	9.900.000,00
5	3050104001	Lemari Besi/Metal	526-530, 532-539, 541	3050104002	Lemari Kayu	617 - 628	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	170.317.620,00
6	3060101005	Amplifier	21 - 52	3050206014	Microphone	114 - 145	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	349.976.000,00
7	3080133010	Exhause Fan (Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas)	16 - 17	3050204007	Exhause Fan	102 - 10	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	8.802.300,00
8	3080602046	Air Purifier	1 - 2	3050203005	Air Cleaner	2 - 3	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Des 2025	39.349.500,00
Total								797.559.390,00

3. Transfer Keluar sebesar Rp1.775.920.663,00 merupakan transfer keluar yang dilakukan Satuan kerja Sekretariat Utama BPOM ke satker lainnya dengan perincian sebagai berikut:

No	Satker Penerima	Nomor BAST	Tanggal	Nama Barang	NUP	Kuantitas	Nilai
1	PPSDM	PL.03.09.25.06.25.201	03 Juni 2025	Note Book	444	1	20.570.000,00
2	BPOM di Surakarta	PL.03.01.25.07.25.94	26 Juni 2025	Brandkas	8	1	8.000.000,00
3	BPOM di Kediri	PL.03.01.25.07.25.29	18 Juli 2025	Kursi Besi	4660-4950	20	29.049.000,00
4	Deputi I	PL.03.09.25.08.25.327	07 Agustus 2025	Note Book	763	1	24.000.000,00
				Sofa	65	1	7.270.500,00
	Deputi III	PL.03.09.25.08.25.328	7 Agustus 2025	Note Book	764	1	24.000.000,00
5				Kursi Besi/Metal	5610	1	3.300.000,00
	PPOMN	PL.03.01.25.07.25.326	01 Agustus 2025	Kursi Besi	5894-6178	150	160.545.000,00
				Loudspeaker	94 97	4	37.032.666,00
6				AC Split	718-719	2	14.749.472,00
7	Deputi I	PL.03.09.25.09.25.139	18 September 2025	Notebook	335-623	2	35.552.000,00
				PC Unit	1121	1	17.500.000,00
	Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	PL.03.09.25.12.25.428	3 Desember 2025	Note Book	574	1	18.300.000,00
8				Printer	887	1	1.848.000,00
	Balai Pengujian Produk Biologi	PL.03.09.25.12.25.433	9 Desember 2025	Kursi Besi/Metal	4687-5395	18	33.305.000,00
9				Meja Kerja Kayu	1976-1983	7	47.508.000,00
10	Deputi II	PL.03.01.25.12.25.436	15 Desember 2025	Mini Bus	50 - 63	2	347.445.000,00
11	Deputi III	PL.03.01.25.12.25.435	15 Desember 2025	Mini Bus	55 - 179	5	902.459.995,00
	Balai POM di Banyumas	PL.03.01.25.12.25.437	15 Desember 2025	PC Unit	861-941	3	38.609.030,00
12				Printer	920-881	2	4.877.000,00
Total						224	1.775.920.663,00

Gedung dan Bangunan
Rp256.847.600.783,00

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp256.847.600.783,00 dan Rp250.211.245.569,00.

Perincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Tabel 19
Perincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		250.211.245.569,00
Mutasi tambah:		6.950.756.788,00
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	1.882.834.735,00	
Pengembangan KDP	3.312.309.379,00	
Pengembangan nilai aset (Langsung)	661.553.650,00	
Reklasifikasi Masuk	1.094.059.024,00	
Mutasi kurang:		(314.401.574,00)
Reklasifikasi Keluar	(297.401.024,00)	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(17.000.550,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		256.847.600.783,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025		(60.689.427.079,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		196.158.173.704,00

Transaksi Mutasi Tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.950,756.788,00 terdiri dari:

1. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp1.882.834.735,00 dengan perician sebagai berikut:

- a. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp71.873.000,00 berupa koreksi nilai wajar nomor PL.03.01.25.07.25.98 tanggal 30 Juni 2025 terhadap Bangunan Gudang Terbuka Permanen NUP 1 merupakan hasil penyesuaian dari hasil penilaian KPKNL Jakarta IV sesuai dengan surat nomor Lap-0020/1/PRO-01/KNL.074/01.1.00/2025 tanggal 25 Febuari 2025 terkait nilai wajar atas Barang Milik Negara.

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Nilai Koreksi	Nomor Surat Koreksi	Tanggal Surat
1	4010102004	1	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	71.873.000,00	PL.03.01.25.07.25.98	30 Juni 2025
Total				71.873.000,00		

- b. Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah sebesar Rp1.810.961.735,00 merupakan koreksi pencatatan sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 unaudited dan telah dicatat melalui aplikasi SAKTI. Adapun penjelasan atas koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama Barang	NUP	Nilai	Nama Barang	NUP	Nilai Koreksi	Tanggal Surat Koreksi	
Semula				Menjadi				
1	Jalan Khusus Kompleks	1	839.400.000	Bagunan Gedung Kantor Permanen	16	1.339.513.735,00	PL.03.09.25.04.26.64 Tgl. 31 Desember 2025	Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah yang berasal dari koreksi pencatatan JJJ menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen. Koreksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 unaudited
2	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil	1	57.970.000					
3	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Besar	1	442.143.735,00					
4	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1	64.991.000,00	Bagunan Gedung Kantor Permanen (BATIK)	34	471.448.000,00	PL.03.09.25.05.26.67 Tgl. 31 Desember 2025	Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah yang semula Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen. Koreksi ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 unaudited
5	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	2	108.318.000,00	Bagunan Gedung Kantor Permanen (ATHENA)	26			
6	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	3	108.318.000,00	Bagunan Gedung Kantor Permanen (GARUDA)	16			
7	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	5	69.730.000,00	Bagunan Gedung Kantor Permanen (REMPAH)	32			
8	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	6	3.874.000,00	Bagunan Gedung Kantor Permanen (BTI)	27			
9	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	7	116.217.000,00	Bagunan Gedung Kantor Permanen (MOZAIK)	23			
Total			1.810.961.735,00			1.810.961.735,00		

2. Pengembangan KDP sebesar Rp 3.312.309.379,00 berupa:

No	Kode Barang	NUP	Nilai KDP	BAST	Tanggal Surat	Keterangan
1	4010101001	26	679.522.879,00	PL.02.01.25.02.25.1245	12 Februari 2025	Definitif KDP Tangga Darurat Gedung Athena
2	4010101004	2	2.632.786.500,00	PL.03.01.25.06.25.88	31 Desember 201	Definitif KDP Trafo Rumah Panel berdasarkan TLHP BPK nomor 1/LHP/XIX/01/2025 tanggal 31 Januari 2025
Total			3.312.309.379,00			

3. Pengembangan Nilai Aset (Langsung) sebesar Rp661.553.650,00 berupa:

No	Kode Barang	NUP	Keterangan	Nilai Pengembangan
1	4010101001	34	Renovasi Ruang Kerja PPSPDM Gd Batik Lt 5	192.645.606,00
2	4010108001	27	Renovasi Toilet Ged BTL Lt 3	50.688.927,00
3	4010101001	16	Renovasi Ruangan Kabadan	199.297.725,00
4	4010101001	34	Renovasi Toilet Ged Batik Lt 1	60.228.156,00
5	4040104001	34	Renovasi Toilet Gedung Batik Lt 3	49.977.417,00
6	4040104001	1	Renovasi Pagar Depan Ged. Garuda Pojok Kanan	60.694.000,00
7	4010101001	23	Renovasi UKPBJ Ged. Mozaik Lt. 3	48.021.819,00
Total				661.553.650,00

4. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp1.094.059.024,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp253.001.024,00 merupakan tindak lanjut atas Laporan Penilaian KPKNL Jakarta IV berupa Bangunan Gudang Terbuka Permanen NUP 1 menjadi Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen NUP 2 sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.02.25.07.25.101 tanggal 10 Juli 2025.
- b. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp841.058.000 merupakan tindak lanjut atas temuan BPK pada Laporan Keuangan TA 2025 *unaudited* berupa Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum NUP 4 menjadi Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 6 sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.09.25.05.26.67 tanggal 31 Desember 2025.

Transaksi Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp314.401.574,00 dijelaskan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi keluar sebesar Rp297.401.024,00 dijelaskan sebagai berikut:

Reklasifikasi Keluar				Reklasifikasi Masuk				
No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan	Nilai
1	4010102004	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1	4010102002	Bangunan Gudang Semi Tertutup	2	PL.03.02.25.07.25.101 tanggal 10 Juli 2025	253.001.024,00
2	4020199999	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya	1	6010303005	Ukiran Batu dan sejenisnya	1	PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Desember 2025	44.400.000,00
Total								297.401.024,00

2. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp17.000.550,00 dengan perincian sebagai berikut :

c. Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang Sebesar Rp11.263.550,00 yang berasal dari belanja modal TAYL dengan perincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	NUP	Nilai Koreksi	Surat Koreksi	Tanggal Surat	Keterangan
1	4010132002	1	6,839,900.00	PL.03.01.25.06.25.87	13 Juni 2025	Pengembalian Pekerjaan Renovasi Ruang TPA TA 2024 (PT Alfa Cahaya Alam)
2	4010101001	34	10,160,650.00	PL.03.01.25.06.25.87	13 Juni 2025	Pengembalian Pekerjaan Renovasi Creativity Zone TA2024 (PT Guna Mandiri Selaras)
3	4010101004	16	2,688,150.00	PL.03.01.25.06.25.87	13 Juni 2025	Pengembalian Pekerjaan Renovasi Ruang Rapat dan TU Sestama TA2024 (PT Tria Makri Dinamika)
Total			19,688,700.00			

d. Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp5.737.000,00 merupakan koreksi pencatatan atas kekurangan volume sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 *unaudited* berupa Gedung bangunan kantor permanen (Ged. PPSDM) NUP 34 sesuai dengan surat nomor PL.03.01.25.04.26.66 tanggal 31 Desember 2025

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp0,00,00

C.2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp2.652.019.735,00. Mutasi transaksi terhadap terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 20
Perincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Jalan dan Jembatan		
Saldo awal 31 Desember 2024		839.400.000,00
Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		(839.400.000,00)
Koreksi Pencatatan	(839.400.000,00)	
Saldo akhir 31 Desember 2025		0,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025		0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025		0,00
Irigasi		
Saldo awal 31 Desember 2024		1.312.506.000,00
Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		(1.312.506.000,00)
Koreksi Pencatatan	(471.448.000,00)	
Reklasifikasi Keluar	(841.058.000,00)	
Saldo akhir 31 Desember 2025		0,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025		0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025		0,00
Jaringan		
Saldo Perolehan 31 Desember 2024		500.113.735,00
Mutasi Tambah		0,00
Mutasi Kurang		(500.113.735,00)
Koreksi Pencatatan	(500.113.735,00)	
Saldo 31 Desember 2025		0,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025		0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025		0
Jumlah Total Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan		0,00
Akumulasi Penyusutan		0,00
Nilai Buku per 31 Desember 2025		0,00

Transaksi Mutasi Kurang Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Satker Sekretariat Utama BPOM sebesar Rp1.821.619.735,00 berupa koreksi pencatatan dari sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 *unaudited* dan telah dicatat melalui aplikasi SAKTI. Adapun perincian atas koreksi pencatatan adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nilai Koreksi	Keterangan
1	5010109002	Jalan Khusus Kompleks	1	839.400.000	Koreksi Pencatatan menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 16 sesuai surat nomor PL.03.09.25.04.26.64 tanggal 31 Desember 2025
2	5030101001	Instalasi Air Permukaan Kapasitas Kecil	1	57.970.000	
3	5030104003	Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Besar	1	442.143.735,00	
4	5020605008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1-3,5-7	471.448.000,00	Koreksi Pencatatan menjadi Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 16,23,26,27,32 dan 34 sesuai surat nomor PL.03.09.25.05.26.67 tanggal 31 Desember 2025
5	5020605008	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	4	841.058.000,00	Reklasifikasi Keluar menjadi Bangunan Gudang Tertutup Permanen NUP 6 sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.09.25.05.26.67 tanggal 31 Desember 2025
Total				2.652.019.735,00	

Aset Tetap Lainnya **C.2.5. Aset Tetap Lainnya**
Rp352.783.472,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya pada Sekretariat Utama BPOM antara lain berupa Peta(map), Lukisan, Monografi, maket/miniatur/replika, barang keramik/gerabah, ikan hias dan alat musik tradisional. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp352.783.472,00 dan Rp853.791.382,00. Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Perincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		853.791.382,00
Mutasi tambah:		44.400.000,00
Reklasifikasi Masuk	44.400.000,00	
Mutasi kurang:		(545.407.910,00)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(545.407.910,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		352.783.472,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		(256.507.450,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		96.276.022,00

- Mutasi Tambah pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp44.400.000,00 merupakan reklasifikasi masuk kode barang 6010303005, NUP 1 berupa Ukiran Batu dan sejenisnya sesuai Surat Keterangan PL.03.01.25.12.25.25 pada tanggal 30 Desember 2025 yang sebelumnya adalah Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya dengan kode barang 4020199999 NUP 1.
- Mutasi Kurang pada Aset Tetap Lainnya sebesar Rp545.407.910,00 merupakan penghentian Aset dari penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	Nama Barang	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
1	6010303001	Monografi	PL.03.07.25.11.25.189	17 Nov 2025	307,164,645.00
2	6010101001	Monografi	PL.03.07.25.11.25.188	18 Nov 2025	238,243,265.00
Total					545,407,910.00

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.155.302.624,00. Perincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut :

Tabel 22

*Perincian Mutasi Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)*

Saldo Nilai Perolahan 31 Desember 2024		4.155.302.624,00
Mutasi tambah		95.316.755,00
Pengembangan KDP	95.316.755,00	
Mutasi Kurang		(4.250.619.379,00)
Pengembangan melalui KDP	(3.312.309.379,00)	
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(912.560.000,00)	
Penghentian KDP Sementara	(25.750.000,00)	
Saldo Per 31 Desember 2025		0,00

1. Penjelasan Perincian Mutasi Tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp95.316.755,00 adalah sebagai berikut:

No	Kode Barang	NUP	Nilai	Keterangan
1	7010101003	45	7.375.576,00	Pembayaran Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Tangga Darurat Gedung Athena sesuai BAST/BAPP Nomor PL.02.01.251.02.05.1384, PL.02.01.25.12.24.11643 Tanggal 12-02-2025, 31-12-2024
2	7010101003	46	87.941.179,00	Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Tangga Darurat Gedung Athena termin II sesuai BAST/BAPP Nomor PL.02.01.25.02.05.1246, PL.02.01.25.12.24.11640 Tanggal 12-02-2025, 31-12-2024
Total			95.316.755,00	

2. Transaksi Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp4.224.869.379,00 adalah sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi KDP menjadi aset tetap (Pengembangan Melalui KDP) sebesar Rp3.312.309.879,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	NUP	Nilai	Keterangan
1	7010101003	45	679.522.879,00	Penyelesaian Pekerjaan Fisik Tangga Darurat Gedung Athena sesuai BAST/BAPP Nomor PL.02.01.25.02.25.1246, PL.02.01.25.12.24.11640 Tanggal 12-02-2025, 31-12-2024
2	7010101003	10	2.632.786.500,00	Penyelesaian Pekerjaan Fisik Trafo sesuai BAST Hasil Pekerjaan Nomor 237/BAST/BU-B/LU/XII/2018 tanggal 31 desember 2018
Total			3.312.309.379,00	

- b. Koreksi Nilai KDP Berkurang sebesar Rp912.560.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	NUP	Nilai	Keterangan
1	7010101003	10	912.560.000,00	Koreksi perubahan nilai berkurang terhadap KDP Trafo karena temuan audit BPK sesuai Surat Keterangan Nomor PL.03.01.25.06.25.88 tanggal 13 Juni 2025
Total			912.560.000,00	

- c. Penghentian sementara KDP sebesar Rp 25.750.000,00 merupakan biaya konsultan perencanaan pekerjaan perencanaan *Rooflop*

Gedung Parkir di bangunan gudang tertutup permanen NUP 46 yang dilakukan penghentian sementara karena tidak adanya realisasi pekerjaan selama tahun 2025 yang disebabkan belum tersedianya anggaran pembangunan KDP sesuai dengan surat Keterangan PL.03.09.25.02.25.23 tanggal 31 Desember 2025.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp165.761.926.469,00

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp165.761.926.469,00 dan Rp149.739.651.646,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	118.937.734.919,00	(104.815.991.940)	14.121.742.979,00
2	Gedung dan Bangunan	256.847.600.783,00	(60.689.427.079)	196.158.173.704,00
3	Aset Tetap Lainnya	352.783.472,00	(256.507.450)	96.276.022,00
Akumulasi Penyusutan		376.138.119.174,00	(165.761.926.469)	210.376.192.705,00

Aset Lainnya
Rp3.464.656.344,00

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Sekretariat Utama BPOM per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.464.656.344,00 dan Rp3.857.207.871,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya Sekretariat Utama BPOM terdiri dari Aset Tak Berwujud.

Aset Tak Berwujud
Rp4.633.408.000,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp4.633.408.000,00 dan Rp4.831.513.300,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetap secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud yang dimiliki Satker Sekretariat BPOM berupa software komputer sebanyak 12 unit dengan kondisi baik. Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Perincian Mutasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		4.831.513.300,00
Mutasi tambah :		49.995.000,00
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	49.995.000,00	
Mutasi Kurang :		(248.100.300,00)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(248.100.300,00)	
Saldo per 31 Desember 2025		4.633.408.000,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		(4.579.429.875,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025		53.978.125,00

Mutasi tambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp49.995.000,00 merupakan pengembangan nilai aset langsung dari pada Software Komputer NUP 57 berupa penambahan Indoikator pada aplikasi Simetris.

Mutasi kurang Aset Tak Berwujud sebesar Rp248.100.300,00 merupakan penghentian Aset dari penggunaannya dengan perincian sebagai berikut:

No	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Nomor Surat	Tanggal	Nilai
1	8010101001	48	Softw are komputer	PL.03.09.252.10.25.360	1 Okt 2025	148,500,000.00
2	8010101001	75	Softw are komputer	PL.03.09.252.10.25.360	1 Okt 2025	99,600,300.00
Total						248,100,300.00

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp3.377.821.317,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.377.821.317,00 dan Rp3.712.267.551,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana yang berasal dari Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) untuk menampung

dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan antara batas akhir pengajuan tagihan kepada negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai akhir TA yang penyelesaiannya diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada TA berikutnya. Dana yang dibatasi penggunaannya dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 25

Perincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Nama Penyedia	Uraian Pekerjaan	Nomor BAST	Tanggal	Nilai
1	PT. MANDRAKIRO WASTIRU PRATAMA	Jasa Cleaning Service (Alih Daya)	PL.02.01.25.12.25.11653	31 Des 2025	858.513.300,00
2	PT. WIRA SANDI	Jasa Keamanan (Alih Daya)	PL.02.01.25.12.25.11652	31 Des 2025	1.276.348.057,00
3	PT. WIRA SANDI	Jasa Keamanan	PL.02.01.25.12.25.11650	31 Des 2025	1.049.169.530,00
4	PT. MANDRAKIRO WASTIRU PRATAMA	Jasa Cleaning Service	PL.02.01.25.12.11651	31 Des 2025	177.125.430,00
5	KIMIA FARMA DIAGNOST	Yankes Pegawai BPOM (Klinik BPOM)	PL .02.02.24.12.25.5321	31 Des 2025	16.665.000,00
Total					3.377.821.317,00

Aset Lain-lain
Rp 45.649.324,00

C.3.3. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp45.649.324,00 dan Rp0,00. Aset Lain-Lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional serta proses penghapusan dari BMN, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 26

Perincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024		0.00
Mutasi tambah :		2,251,135,567.00
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	2,225,385,567.00	
Penghentian Sementara KDP	25,750,000.00	
Mutasi Kurang :		(2,205,486,243.00)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(2,205,486,243.00)	
Saldo per 31 Desember 2025		45,649,324.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2025		12,792,422.00
Nilai Buku per 31 Desember 2025		58,441,746.00

Transaksi Mutasi Tambah Aset Lain-Lain sebesar Rp2.251.135.567,00 merupakan Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional Pemerintah dengan penjeasan sebagai berikut:

1. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Penghentian Aset dari Penggunaannya sebesar Rp2.225.385.567 merupakan Barang Milik Negara yang dihentikan penggunaannya dari operasional Pemerintah, dengan perincian sebagai berikut:

No	Kuantitas	Nilai	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan
1	1	73,000,000.00	PL.03.09.25.04.25.96	22-Apr-25	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) NUP 197
2	490	1,000,855,216.00	PL.03.07.25.11.25.419	17-Nov-25	Penghentian 490 unit PM dan ATL
3	491	1,131,631,027.00	PL.03.07.25.11.25.420	18-Nov-25	Penghentian 491 unit PM dan ATL
4	1	19,899,324.00	PL.03.09.25.12.25.22	31-Dec-25	berupa penghentian sepeda motor NUP 70 yang merupakan BMN hilang
Total		2,225,385,567.00			

Aset Lain-Lain sebesar Rp19.809.324,00 pada Sekretariat Utama BPOM merupakan Aset Tetap yang Dihentikan Penggunaannya berupa kendaraan bermotor dengan NUP 70 yang hilang dan telah ditetapkan TGR nya berdasarkan SKTJM tanggal 29 Desember 2025. Aset Lain-Lain tersebut belum dapat dieliminasi dari Neraca dan Laporan BMN karena Aplikasi SAKTI yang belum sepenuhnya dapat menerapkan PMK 100 Tahun 2025.

2. Reklasifikasi dari Aset KDP ke Aset Lainnya sebesar Rp25.750.000,00 merupakan Penghentian Sementara pada Gedung dan Bangunan Dalam P NUP 2 berupa perencanaan rooftop bangunan gudang tertutup permanen sesuai surat keterangan nomor PL.03.09.25.12.25.22 tanggal 31 Desember 2025.

Transaksi Muasi Kurang Aset Lain-Lain sebesar Rp2.205.486.243,00 merupakan Pencatatan Barang yang mau dihapuskan dengan perician sebagai berikut;

No	Kuantitas	Nilai	Nomor Surat	Tanggal	Keterangan
1	1	73,000,000.00	PL.03.09.25.04.25.96	22-Apr-25	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) NUP 197
2	490	1,000,855,216.00	PL.03.07.25.11.25.419	17-Nov-25	Penghentian 490 unit PM dan ATL
3	491	1,131,631,027.00	PL.03.07.25.11.25.420	18-Nov-25	Penghentian 491 unit PM dan ATL
Total		2,205,486,243.00			

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp4.592.222.297,00

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp4.592.222.297,00 dan Rp4.686.572.980,00. Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Perincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Tabel 27
Perincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
per 31 Desember 2025*

(Dalam Rupiah)

NO	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Software	4,633,408,000.00	(4,579,429,875.00)	53,978,125.00
	Aset Lain-lain			
2	Aset Tetap yg tidak digunakan dalam operasi Pemerintah	19,899,324.00	(12,792,422.00)	32,691,746.00
	Jumlah	4,653,307,324.00	(4,592,222,297.00)	86,669,871.00

Kewajiban Jangka Pendek Rp3.865.504.696,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Sekretariat Utama BPOM per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.865.504.696,00 dan Rp36.637.995.431,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp3.815.744.705,00

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing – masing adalah sebesar Rp3.815.744.705,00 dan Rp36.524.277.424,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun perincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Lingkup Sekretariat Utama BPOM per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 28
Perincian Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	93.114.677,00
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	373.733.456,00
3	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	3.348.896.572,00
Total		3.815.744.705,00

Penjelasan terhadap Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp3.815.744.705,00 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar sebesar Rp93.114.677,00 merupakan tagihan belanja pegawai yang sampai akhir periode pelaporan belum dibayarkan dan baru dilakukan pembayaran pada tahun berikutnya. Rekapitulasi Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar dapat dilihat pada lampiran 8.
2. Belanja Barang yang Masih harus Dibayar sebesar Rp373.733.456,00 merupakan tagihan belanja barang yang Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nya belum terbit sampai dengan periode pelaporan. Adapun perincian Belanja Barang yang Masih harus Dibayar adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Dokumen	Nilai
1	Tagihan listrik bulan Januari 2026 atas pemakaian bulan Desember 2025 dengan ID Pelanggan 541300272839	SPM No.00048T tgl. 14/01/2026, SP2D No. 261750000001794 tgl.15/01/2026	364.456.439,00
2	Tagihan listrik bulan Januari 2026 atas pemakaian bulan Desember 2025 dengan ID Pelanggan 541300400144	SPM No.00049T tgl. 14/01/2026, SP2D No.261750000001795 tgl.15/01/2026	6.971.496,00
3	Tagihan Telepon bulan Januari 2026 atas pemakaian bulan Desember 2025	SPM No.00050T tgl. 12/01/2026, SP2D No.261750000001796 tgl.14/01/2026	2.305.521,00
Total			373.733.456,00

3. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp3.348.896.572,00 merupakan pengakuan utang atas pengajuan RPTA yang penyelesaia pekerjaannya sampai dengan 31 Desember 2025 dan pembayarannya dilakukan pada Januari 2026. Adapun perincian utang kepada pihak ketiga lainnya adalah sebagai berikut:

No	Penyedia	Uraian Jenis Pekerjaan	Kontrak			Nilai
			Nomor dan Tanggal	Tgl. Mulai	Tgl. Selesai	
1	PT. MANDAKIRO WASTIRU PRATAMA	PENGADAAN JASA CLEANING SERVIS (ALIH DAYA)	PL.02.01.251.12.24.11632 Tgl.31 Desember 2024	01/01/2025	31/12/2025	177.125.430,00
2	PT. WIRA SANDI	Pengadaan Jasa Keamanan (Alih Daya)	PL.02.01.251.12.24.11630 Tgl. 31 Desember 2024	01/01/2025	31/12/2025	887.438.045,00 (28.924.745,00)
3	PT. WIRA SANDI	Pengadaan Jasa Keamanan	PL.02.01.251.12.24.11629 Tgl.31 Desember 2024	01/01/2025	31/12/2025	1.276.348.057,00
4	PT. MANDAKIRO WASTIRU PRATAMA	PENGADAAN JASA CLEANING SERVICE	PL.02.01.251.12.24.11631 Tgl.31 Desember 2024	01/01/2025	31/12/2025	1.020.244.785,00
5	KIMIA FARMA DIAGNOST	Pelayanan Kesehatan Pegawai BPOM (Klinik BPOM)	PL.02.02.24.01.25.1 Tgl. 02 Januari 2025	02/01/2025	31/12/2025	16.665.000,00
Total						3.348.896.572,00

Pendapatan Diterima Dimuka Rp49.759.991,00

C.4.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp49.759.991,00 dan Rp113.718.007,00. Pendapatan Diterima

Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan sepehuhnya. Pendapatan Diterima Dimuka pada Sekretariat Utama BPOM merupakan pendapatan atas sewa gedung dan bangunan. Adapun perincian Pendapatan Diterima Dimuka pada Satker Sekretariat Utama dapat dijelaskan pada lampiran 9.

Ekuitas

Rp874.529.755.938,00

C.5. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp874.529.755.938,00 dan Rp819.028.921.835,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp155.540.583,00

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp155.540.583,00 dan Rp96.875.285,00. Perincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 29

*Perincian Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
 Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dalam Rupiah)*

AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	129.996.289,00	85.693.365,00	51,70
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Penyelesaian Pemerintah	25.544.294,00	11.181.920,00	128,44
Jumlah		155.540.583,00	96.875.285,00	60,56

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Satker Sekretariat Utama BPOM sebesar Rp155.540.583,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan sebesar Rp129.996.289,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pendapatan sewa ATM BRI sebesar Rp9.895.200,00 untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai kontrak nomor PL.03.06.25.06.25.04 tanggal 25 Juni 2025 dengan NTPN 59DCE3CIFTKMKSOQ tanggal 25 Juni 2025;
 - b. Pendapatan sewa kantin Meizanin sebesar Rp31.182.118,00 terdiri dari:

- Pendapatan sewa kantin Meizanin sebesar Rp29.435.070,00 untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai kontrak nomor PL.03.06.25.12.24.03 tanggal 26 November 2024; dan
 - Pendapatan dari perpanjangan sewa sebesar Rp1.747.048,00 untuk periode 28 november 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai kontrak nomor. PL.03.06.25.12.25.06 tanggal 28 November 2025 dengan NTPN 2C2E348VVOM0F0Q6 tanggal 28 November 2025
- c. Pendapatan sewa kantin Pikoelan sebesar Rp72.331.830,00 terdiri dari:
- Pendapatan sewa kantin Pikoelan sebesar Rp58.380.754,00 merupakan untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 28 Oktober 2025 sesuai dengan kontrak nomor PL.03.06.25.12.24.67 tanggal 29 Oktober 2024;
 - Pendapatan atas keterlambatan sewa sebesar Rp5.423.334,00 untuk periode 1 September 2024 sampai dengan 28 Oktober 2024 berdasarkan Adenddum kontrak nomor PL.03.06.25.03.25.01 tanggal 7 Maret 202 dengan NTPN 021301JNG86EV33T tanggal 7 Maret 2025;
 - Pendapatan atas keterlambatan sewa sebesar Rp8.527.742.742,00 untuk periode 29 Oktober 2025 sampai dengan 14 Desember 2025 berdasarkan Adenddum kontrak nomor PL.03.06.25.01.26.01 tanggal 7 Desember 2025 dengan NTPN 2038F2G503K5AKOC tanggal 24 Desember 2025.
- d. Pendapatan sewa Kantin Pikoelan Lantai 2 sebesar Rp634.141,00 untuk periode 15-31 Desember 2025 sesuai kontrak nomor PL.03.06.25.12.25.08 tanggal 15 Desember 2025 dengan NTPN 8E2177QLV324JELO tanggal 15 Desember 2025.

- e. Pendapatan sewa ATM Mandiri sebesar Rp15.953.000,00 untuk periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 sesuai kontrak nomor PL.03.06.25.251.09.23.02 tanggal 29 September 2023.
2. Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah sebesar Rp25.374.894,00 terdiri dari:
 - a. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas Pengadaan Tangga Darurat Gedung Athena sebesar Rp 23.411.394,00 dengan SP2D nomor 259991302006487 tanggal 20 Februari 2025; dan
 - b. Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan atas Jasa Konsultan Pengawas Pembangunan Tangga Darurat Gedung Athena sebesar Rp1.963.500,00 dengan SP2D nomor 259991302006501 tanggal 21 Februari 2025.

Satker Sekretariat Utama BPOM terdapat selisih akun Pendapatan pada LRA dan LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 karena adanya jurnal akrual pendapatan diterima dimuka, settlement piutang, dan pengembalian pendapatan/belanja TAYL melalui potongan SPM yang belum terbit SP2D.

Beban Pegawai
Rp560.182.932.330,
00

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp560.182.932.330,00 dan Rp269.593.572.072,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 30

Perincian Beban Pegawai

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji Pokok PNS	65.150.912.691,00	61.465.343.900,00	6,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	893.644,00	844.837,00	5,78
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3.873.452.276,00	3.681.919.372,00	5,20
Beban Tunj. Anak PNS	1.017.772.759,00	969.179.597,00	5,01
Beban Tunj. Struktural PNS	1.512.235.000,00	1.488.470.000,00	1,60
Beban Tunj. Fungsional PNS	10.748.482.332,00	10.458.968.000,00	2,77
Beban Tunj. PPh PNS	22.386.975.111,00	874.842.986,00	2.458,97
Beban Tunj. Beras PNS	2.986.238.700,00	2.812.704.420,00	6,17
Beban Uang Makan PNS	10.056.186.000,00	7.170.807.000,00	40,24
Beban Tunj. Khusus Papua PNS	15.300.000,00	15.300.000,00	-
Beban Tunjangan Umum PNS	434.535.000,00	164.490.000,00	164,17
Beban Gaji Pokok PPPK	13.079.178.991,00	9.131.826.400,00	43,23
Beban Pembulatan Gaji PPPK	200.448,00	141.730,00	41,43
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	696.916.458,00	446.336.480,00	56,14
Beban Tunjangan Anak PPPK	163.033.430,00	95.928.028,00	69,95
Beban Tunjangan Struktural PPPK	105.875.000,00	22.000.000,00	381,25
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1.317.557.333,00	1.105.466.000,00	19,19
Beban Tunjangan Beras PPPK	646.457.130,00	423.946.680,00	52,49
Beban Uang Makan PPPK	2.447.079.000,00	1.357.975.000,00	80,20
Beban Tunjangan Umum PPPK	127.665.000,00	-	-
Beban Uang Lembur	486.779.000,00	1.087.018.000,00	(55,22)
Beban Uang Lembur PPPK	106.712.000,00	127.834.000,00	(16,52)
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	383.000.124.960,00	152.311.834.616,00	151,46
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	39.822.370.067,00	14.380.395.026,00	176,92
Jumlah	560.182.932.330,00	269.593.572.072,00	107,79

Pada periode pelaporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025, Satker Sekretariat Utama BPOM memiliki selisih Beban pegawai yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan adanya jurnal manual/jurnal penyesuaian khusus berupa beban pegawai yang masih harus dibayar.

Beban Persediaan
Rp1.113.500.960,00

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.113.500.960,00 dan Rp1.568.711.285,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Perincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut:

Tabel 31

Perincian Beban Persediaan

*Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
 (Dalam Rupiah)*

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.113.500.960,00	1.568.711.285,00	(29,02)
Jumlah	1.113.500.960,00	1.568.711.285,00	(29,02)

Pada periode Pelaporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025, Satker Sekretariat Utama BPOM memiliki selisih Beban Persediaan yang terdapat pada LRA dan LO dikarenakan terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.

*Beban Barang dan
 Jasa*
Rp64.635.556.606,00
0

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp64.635.556.606,00 dan Rp83.771.053.887,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Perincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 32

Perincian Beban Barang dan Jasa

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	12.475.255.213,00	23.637.828.021,00	(47,22)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	179.398.966,00	113.995.000,00	57,37
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	56.662.935,00	85.975.658,00	(34,09)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1.490.169.500,00	1.257.730.000,00	18,48
Beban Barang Operasional Lainnya	1.385.800.000,00	380.391.850,00	264,31
Beban Bahan	5.427.312.100,00	9.518.518.452,00	(42,98)
Beban Honor Output Kegiatan	0,00	708.044.000,00	(100,00)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	500.602.245,00	3.836.990.307,00	(86,95)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,00	43.139.850,00	(100,00)
Beban Langganan Listrik	4.563.060.971,00	5.510.985.897,00	(17,20)
Beban Langganan Telepon	82.044.476,00	99.626.085,00	(17,65)
Beban Langganan Air	782.579.469,00	463.312.739,00	68,91
Beban Jasa Konsultan	229.648.344,00	2.552.259.778,00	(91,00)
Beban Sewa	6.703.216.138,00	5.193.399.893,00	29,07
Beban Jasa Profesi	2.211.020.000,00	3.285.600.000,00	(32,71)
Beban Jasa Lainnya	28.548.786.249,00	27.081.636.357,00	5,42
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0,00	1.620.000,00	(100,00)
Jumlah	64.635.556.606,00	83.771.053.887,00	(22,84)

Pada periode Pelaporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025, Satker Sekretariat Utama BPOM memiliki selisih Beban Barang dan Jasa yang terdapat pada LRA da LO dikarenakan terdapat jurnal akrual belanja barang yang masih harus dibayar dan revisi SPM.

*Beban**Pemeliharaan**Rp9.709.341.398,00***D.5. Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.709.341.398,00 dan Rp18.424.513.567,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Perincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Perincian Beban Pemeliharaan
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.660.987.965,00	9.676.477.134,00	(72,50)
Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	1.377.169.622,00	998.168.301,00	37,97
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.525.526.031,00	7.629.147.211,00	(27,57)
Beban Pemeliharaan Lainnya	24.000.000,00	-	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	121.657.780,00	120.720.921,00	0,78
Jumlah	9.709.341.398,00	18.424.513.567,00	(47,30)

Pada periode pelaporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025, Satker Sekretariat Utama BPOM memiliki selisih Beban Pemeliharaan yang terdapat pada LRA dan LO karena terdapat persediaan yang masih tercatat di neraca dan persediaan yang berasal dari pengadaan tahun anggaran yang lalu yang baru digunakan tahun ini.

*Beban Perjalanan**Dinas**Rp10.040.037.923,00***D.6. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.040.037.923,00 dan Rp57.451.106.433,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Perincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 34

Perincian Beban Perjalanan Dinas

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	7.022.668.612	17.829.226.413	(60,61)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	541.468.000	874.929.555	(38,11)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	482.435.000	20.175.517.204	(97,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.055.629	13.188.131.009	(99,81)
Beban Perjalanan Dinas Lainnya Luar Negeri	1.968.410.682	5.383.302.252	(63,43)
Jumlah	10.040.037.923	57.451.106.433	(82,52)

Pada periode pelaporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025, Satker Sekretariat Utama BPOM tidak memiliki selisih Beban Perjalanan Dinas yang terdapat pada LRA dan LO.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp19.947.763.863,00

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.947.763.863,00 dan Rp22.600.324.725,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 35

Perincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)

URAIAN JENIS BEBAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.648.996.363,00	13.065.676.625,00	(18,50)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9.181.288.999,00	8.787.716.282,00	4,48
Beban Penyusutan Irigasi	0,00	87.100.251,00	-
Beban Penyusutan Jaringan	0,00	17.691.200,00	-
Beban Amortisasi Software	116.057.120,00	642.140.367,00	(81,93)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam opr Pemerintah	1.421.381,00	0,00	-
Jumlah	19.947.763.863,00	22.600.324.725,00	(11,74)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp(8.651.273,00)

D.8. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(8.651.273,00) dan Rp0,00. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Adapun perincian atas Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Satker Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

1. Sebesar Rp(8.727.273,00) berasal dari piutang dengan kategori macet atas piutang pegawai yang mengundurkan diri dari CPNS/PNS sebelum waktu yang ditetapkan a. Wiwit Suwatini dan sudah dihapuskan. Namun setelah dihapuskan diketahui bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembayaran atas piutang tersebut dengan NTPN 837431JNG842FPFF tanggal 26 Februari 2025; dan
2. Sebesar Rp76.000 adalah Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang merupakan koreksi atas penyisihan Piutang TGR hasil Temuan BPK atas Laporan Keuangan TA 2025 Unaudited atas kehilangan 1 unit kendaraan bermotor roda

dua atas nama Disya Carolina Bening Pramudya sesuai dengan SKTJM tanggal 29 Desember 2025.

tersebut merupakan koreksi atas Penyisihan Piutang TGR hasil Temuan BPK atas Laporan Keuangan TA 2025 Unaudited atas kehilangan 1 unit kendaraan bermotor roda dua atas nama Disya Carolina Bening Pramudya sesuai dengan SKTJM tanggal 29 Desember 2025.

Kegiatan Non

Operasional

Rp(283.262.057,00)

D.9. Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebagai berikut :

Tabel 36

Perincian Kegiatan Non Operasional

Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	262.393.680,00	137.964.000,00	90,19
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	661.290.074,00	27.060.000,00	2343,79
Jumlah Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(398.896.394,00)	110.904.000,00	(459,68)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	115.634.337,00	189.667.838,00	(39,03)
Beban dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0,00	7.550.000,00	(100,00)
Jumlah Surplus (Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	115.634.337,00	182.117.838,00	(36,51)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	(283.262.057,00)	293.021.838,00	(196,67)

Penjelasan atas Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional sebesar Rp(283.262.057,00) adalah sebagai berikut:

1. Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp(398.896.394,00) terdiri dari:
 - a. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp262.393.680,00 dengan perincian sebagai berikut:

- i. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp28.290.180,00 berupa barang inventaris sesuai Risalah Lelang Nomor RL-131/07.04/2025-01 tanggal 14 Juli 2025 dengan NTPN 3E4322G5035011OI tanggal 14 Juli 2025.
- ii. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya sebesar Rp234.103.500,00 dengan perincian sebagai berikut:
 - Pendapatan dari Pemindahantanganan BMN lainnya sebesar Rp97.565.000,00 berupa 1 paket barang inventaris kantor dalam kondisi scrap sesuai Risalah Lelang No. RL-22/07.04/2025-01 tanggal 3 Februari 2025 dengan NTPN 3D94C6U8F7HPVJOU tanggal 6 Februari 2025;
 - Pendapatan dari Pemindahantanganan BMN lainnya sebesar Rp126.000.000,00 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 4 sesuai Risalah Lelang No. RL-28/07.04/2025-01 tanggal 6 Februari 2025 dengan NTPN 40D503CIFT88F60T tanggal 7 Februari 2025; dan
 - Pendapatan dari Pemindahantanganan BMN lainnya sebesar Rp10.538.500,00 berupa barang inventaris kantor dalam kondisi rusak berat sesuai Risalah Lelang No. RL-331/07.04/2025-01 tanggal 16 Desember 2025 dengan NTPN 65FE548VVOOPN5R6 tanggal 18 Desember 2025.
- b. Beban Pelepasan Aset Non Lancar sebesar Rp661.290.074,00 merupakan beban yang timbul akibat pelepasan/penghapusan aset non lancar milik Sekretariat Utama BPOM yang dicatat sebesar nilai buku aset dengan kondisi barang rusak/usang. Adapun perincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Nilai
1	Barang Keramik/Gerabah	3,440,360.00
2	Infrared Thermometer	21,466,680.00
3	Lampu	3,281,760.00
4	Lap Top	9,740,000.00
5	Lukisan Cat Air	9,120,000.00
6	Lukisan Kanvas	29,055,000.00
7	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	446,424.00
8	Microphone/Wireless MIC	17,538,000.00
9	Monografi	503,167,550.00
10	Note Book	24,616,000.00
11	Penyemprot Mesin(Power Suprayer)	4,550,000.00
12	Peta (Map)	625,000.00
13	Pot Bunga	980,100.00
14	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2,413,125.00
15	Software Komputer	24,900,075.00
16	Uninterrupted Power Supllay (UPS)	2,310,000.00
17	Video Conference	3,640,000.00
Total		661,290,074.00

2. Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp115.634.337,00 berasal dari pendapatan penerimaan TAYL dan pendapatan atas setoran dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL merupakan pendapatan atas pengembalian Gaji, uang makan, dan tunjangan kinerja PNS dan PPPK sebesar Rp42.727.512,00 terdapat pada lampiran 2.
 - b. Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp1,088.205,00 berupa pengembalian belanja perjalanan dinas dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Dokumen	Tgl. Dokumen	Nilai
1	Pengembalian PD Surakarta dan Yogyakarta an Chairani dkk	60DD261QVCSN5S1B	45673	118,000.00
2	Pengembalian PD Tarakan dan Mataram an Jayadi dkk (ROUM)	8CEA93CIFT5HURR4	45673	300,000.00
3	Pengembalian PD Surakarta dan Yogyakarta an Prima S dkk	A6E980NA0DECNS7P	45673	229,250.00
4	Pengembalian PD Tasikamalaya dan bandung an Henri Agus K. dkk	E090F55DFIAAOST8	45673	440,955.00
TOTAL				1,088,205.00

c. Pendapatan Setoran dan Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS sebesar Rp56.618.620,00, dengan perincian sebagai berikut:

i. Terdapat pendapatan atas setoran kas negara non KAI dari PT. Taspen Persero sebesar Rp52.562.520,00, terdiri dari :

No	Uraian	NTPN	Tgl. Dokumen	Nilai
1	Setoran bulan Januari 2025	E30AC7QLV219DFN2	10 Januari 2025	500,000.00
2	Setoran bulan Februari 2025	7DB1655DFID2DFRR	10 Februari 2025	500,000.00
3	Setoran bulan Maret 2025	F066D6U8F7KPE26B	10 Maret 2025	500,000.00
4	Setoran bulan April 2025	51E5661QVD5F2R8I	10 April 2025	32,335,520.00
5	Setoran bulan Mei 2025	6175255DFIM19L45	09 Mei 2025	300,000.00
6	Setoran bulan Juni 2025	BDF6861QVDB8VKL2	10 Juni 2025	300,000.00
7	Setoran bulan Juli 2025	D94482G5034RE2C9	10 Juli 2025	300,000.00
8	Setoran bulan Agustus 2025	E582F55DFIUST7T8	08 Agustus 2025	300,000.00
9	Setoran bulan September 2025	118587QLV2P37JNQ	10 September 2025	148,400.00
10	Setoran bulan Oktober 2025	092BF8N3ETEF2CD	10 Oktober 2025	17,378,600.00
TOTAL				52,562,520.00

ii. Terdapat pendapatan atas setoran kas negara sebesar Rp4.056.100,00 berupa setoran pengembalian gaji november 2024 NIP 199203072015021002 an. RIZKY EKA WIJAYA, berdasarkan SK BPOM No. KP.09.03.1.2.12.24.93 Tahun 2024

Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai PNS NTPN CC16F0NA0DKFTN6J tanggal 21 Maret 2025.

- d. Sebesar Rp15.200.000,00 merupakan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap pegawai atas nama Disya Carolina Bening Pramudya atas ganti rugi sebuah kendaraan bermotor sesuai dengan SKTJM tanggal 29 Desember 2025. Surat Pengesahan TGR masih dalam proses oleh Tim TGR BPOM.

Pos Luar Biasa
Nihil

D.10. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diperkirakan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal**Rp819.028.921.835,00***E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp819.028.921.835,00 dan Rp912.112.873.100,00.

*Defisit LO**Rp665.748.203.281,00***E.2 Surplus /(Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp665.748.203.281,00 dan Rp453.019.384.846,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi yang**Menambah/Mengurangi**Ekuitas**Rp(1.078.716.528,00)***E.3 Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(1.078.716.528,00) dan Rp10.514.273,00.

*Penyesuaian Nilai Aset**Rp0,00***E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan**Rp0,00***E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Atas**Reklasifikasi**Rp1.332.000,00***E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi**

Koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.332.000,00 dan Rp0,00.

Koreksi atas reklasifikasi keluar berupa Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Lainnya dikarenakan kesalahan kodefikasi sesuai surat keterangan nomor PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Desember 2025.

*Selisih Revaluasi Aset
Rp0,00*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul atas koreksi/perbaikan terhadap hasil penilaian kembali aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Nilai Aset Non
Revaluasi
Rp(150.919.734,00)*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(150.919.734,00) dan Rp10.514.273,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap yang bukan karena penilaian ulang aset.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini akibat dari adanya koreksi atas aset dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 37

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

No.	Uraian	Nilai
1	Koreksi Pencatatan atas Nilai KDP Berkurang Trafo karena temuan BPK sesuai Surat Keterangan Nomor PL.03.01.25.06.25.88 tanggal 13 Juni 2025	(912,560,000.00)
2	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas pengembalian pekerjaan renovasi pekerjaan ruang TPA sesuai Surat koreksi nomor PL.03.01.25.06.25.87 tanggal 13 Juni 2025	(6,743,563.00)
3	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas pengembalian pekerjaan renovasi creavity zone sesuai surat koreksi nomor PL.03.01.25.06.25.87 tanggal 13 Juni 2025	(1,735,500.00)
4	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas pengembalian pekerjaan renovasi ruang rapat dan TU Sestama sesuai surat koreksi nomor PL.03.01.25.06.25.87 tanggal 13 Juni 2025	(2,584,759.00)
5	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah atas bangunan gudang terbuka Permanen NUP 1 merupakan hasil penyesuaian dari hasil penilaian KPKNL Jakarta IV sesuai dengan surat keterangan nomor PL.03.01.25.07.25.98 tanggal 30 Juni 2025.	71,154,270.00
6	Koreksi Pencatatan atas Reklasifikasi Masuk berupa air cleaner sesuai surat keterangan nomor PL.03.01.25.12.25.25 tanggal 30 Desember 2025 dan exhaust fan sesuai surat keterangan nomor PL.03.01.25.01.25.03 tanggal 30 Desember 2026	(8,726,148.00)
7	Jurnal Manual atas Pengembalian Belanja Modal TAYL	11,263,550.00
8	Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah Bangunan Gedung Kantor Permanen dari JJ dan Bangunan menara/bak penampungan/ reservoir air minum sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 unaudited berupa Gedung bangunan kantor permanen sesuai dengan surat nomor PL.03.09.25.04.26.64 dan PL.03.09.25.05.26.67 tanggal 31 Desember 2025	1,280,558,362.00
9	Koreksi Pencatatan Nilai instalasi Permukaan Kapasitas Kecil, Koreksi Pencatatan Jalan Khusus Kompleks, Koreksi Pencatatan Instalasi Air Tanah Dangkal Kapasitas Besar, dan Bangunan menara/bak penampungan/ reservoir air minum sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 unaudited berupa Gedung bangunan kantor permanen sesuai dengan surat nomor PL.03.09.25.04.26.64 dan PL.03.09.25.05.26.67 tanggal 31 Desember 2025	(651,867,586.00)
10	Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang atas kekurangan volume sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan TA 2025 unaudited berupa Gedung bangunan kantor permanen (Ged. PPSDM) sesuai dengan surat nomor PL.03.01.25.04.26.66 tanggal 31 Desember 2025	(5,737,000.00)
11	Koreksi Pencatatan atas Reklasifikasi Masuk Bangunan Gudang Tertutup Permanen sesuai surat keterangan PL.03.02.25.07.25.101 tanggal 10 Juli 2025	76,058,640.00
Jumlah		(150,919,734.00)

*Koreksi Lain-lain**Rp(929.128.794,00)***E.3.6 Koreksi Lain-lain**

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp(929.128.794,00) dan Rp0,00. Koreksi lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Adapun koreksi lain-lain yang terdapat pada satker Sekretariat Utama BPOM adalah koreksi atas nilai Harga Pokok Perolehan (HPP) Belanja Pegawai berupa Tunjangan kinerja Desember 2025 yang berasal dari satker

P3OMN sebesar Rp621.040.051,00 dan satker BBPOM di Yogyakarta sebesar Rp308.088.743,00.

Transaksi Antar Entitas
Rp722.327.753.912,00

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp722.327.753.912,00 dan Rp359.924.919.308,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Badan POM, antar BPOM, maupun BPOM dengan BUN. Perincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Tabel 38

*Perincian Nilai Transaksi Antar Entitas
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024
(Dalam Rupiah)*

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	681,260,064,644.00	407,426,851,237.00
2	Diterima dari Entitas Lain	(474,401,407.00)	(474,049,148.00)
3	Transfer Keluar	(113,512,450.00)	(47,889,816,272.00)
4	Transfer Masuk	5,603,125.00	861,933,491.00
5	Pengesahan Hibah Langsung	41,650,000,000.00	0.00
Jumlah		722,327,753,912.00	359,924,919,308.00

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Perincian DKEL untuk periode yang berakhir pada 2025 sebesar Rp681.260.064.644,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 39

*Perincian Atas Nilai Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(Dalam Rupiah)*

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	599.370.602.000,00	593.491.939.419,00	99,02
Belanja Barang	177.004.280.000,00	85.582.807.922,00	48,35
Belanja Modal	2.215.668.000,00	2.185.317.303,00	98,63
Jumlah	778.590.550.000,00	681.260.064.644,00	87,50

E.4.2 Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain (DDEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode yang berakhir 31 Desember 2025 DDEL sebesar Rp474.401.407,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 40
Perincian Atas Nilai Diterima dari Entitas Lain (DDKEL)
Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	0.00	474,401,407.00	-
Jumlah	0.00	474,401,407.00	-

E.4.3 Transfer Keluar

Transfer masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal Badan BPOM, antara Kementerian/Lembaga dan antar Badan POM dengan BA-BUN.

Transfer Keluar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di satker Sekretariat Utama BPOM sebesar Rp113.512.450,00 merupakan Transaksi Transfer Keluar ke beberapa satker dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 41
Perincian Atas Transfer Keluar
untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

No	Satker Penerima	Uraian	Nilai	Kuantitas	Nomor BAST	Tanggal
1	Deputi I	Boks Arsip	975,000.00	50	PL.03.07.25.07.25.303	22-Jul-25
		Note Book	24,000,000.00	1	PL.03.09.25.08.25.327	07-Aug-25
		Sofa	7,270,500.00	1		
2	Deputi III	Boks Arsip	2,437,500.00	125	PL.03.07.25.08.25.332	20-Aug-25
		Boks Arsip	1,462,500.00	75	PL.03.07.25.08.25.332	01-Sep-25
		Note Book	24,000,000.00	1	PL.03.09.25.08.25.328	07-Aug-25
		Kursi Besi/Metal	3,300,000.00	1		
		Mini bus	902,459,995.00	5	PL.03.01.25.12.25.435	15-Dec-25
		akum.peny	(905,099,995.00)			
3	PPOMN	Kursi Besi	193,845,000.00	150	PL.03.09.25.12.25.326	01-Dec-25
		Loudspeaker	3,732,666.00	4		
		AC Split	14,749,472.00	2		
		akum.peny	(180,218,138.00)			
4	BPOM di Banyumas	P.C Unit	38,609,030.00	3	PL.03.01.25.12.25.437	15-Dec-25
		Printer	4,877,000.00	2		
		akum.peny	(43,116,280.00)			
5	BPOM di Balikpapan	Boks Arsip	975,000.00	50	PL.03.07.25.08.25.329	07-Aug-25
6	Balai Pengujian Produk Biologi	Map Folder	250,000.00	100	PL.03.07.25.05.25.179	02-Jun-25
		Kursi Besi/Metal	33,305,000.00	18	PL.03.09.25.12.25.433	09-Dec-25
		Meja Kerja Kayu	47,508,000.00	8		
		akum.peny	(61,809,800.00)			
Total			113.512.450.00	596		

E.4.4 Transfer Masuk

Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 di satker Sekretariat Utama BPOM adalah sebesar Rp5.603.125,00 merupakan transaksi masuk dari beberapa satker dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 42
Perincian Transfer Masuk
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

(dalam Rupiah)

No	Satker Pengirim	Uraian	Nilai	Kuantitas	Nomor BAST	Tanggal
1	Pusdatin	Note Book	17,125,000.00	1	PL.03.07.8.04.25.41	15 Mei 2025
		akum. Peny	(14,984,375.00)			
2	Deputi II	Laptop	13,850,000.00	1	PL.03.07.42.06.25.07	15 Juni 2025
		Table PC	7,549,850.00	1		
		akum. Peny	(17,937,350.00)			
Total			5.603.125.00	3		

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp41.650.000,00 dan Rp0,00. Hibah yang diterima oleh satker Sekretariat Utama BPOM merupakan Hibah Langsung Luar Negeri yang berasal dari *Gates Foundation* sesuai *Grant Agreement* Nomor INV-094868 tanggal 2 Desember 2025 untuk kegiatan Penguatan Regulasi Vaksin di Indonesia dalam rangka Meningkatkan Kapasitas Pelepasan dan Efisiensi Lot dengan nomor register 2DNA9Q7A. Selama periode laporan TA 2025, satker Sekretariat Utama BPOM sudah menerima pencairan pertama pada tanggal 22 Desember 2025 melalui rekening penampung hibah langsung dengan nama rekening RPL 140 PDHL BPOM dan nomor rekening 2228255583 sebesar US\$ 2.500.000 atau Rp41.650.000,00. Pendapatan tersebut telah dilakukan pengesahan sesuai surat pengesahan penerimaan hibah langsung nomor 251400000001058 tanggal 31 Desember 2025. Adapun sampai 31 Desember 2025 kegiatan *Gates Foundation* belum dilaksanakan dikarenakan masih ada perubahan rencana kegiatan pada satuan kerja penerima dana hibah. Pelaksanaan kegiatan direncanakan mulai TA 2026, sehingga saldo masih tersaji sebagai kas lainnya dan setara kas.

Ekuitas Akhir

Rp874.529.755.938,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp874.529.755.938,00 dan Rp819.028.921.835,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

*Tindak Lanjut Temuan
BPK*

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

F.1.1. Tindak Lanjut Temuan BPK

Rekapitulasi hasil status pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan periode 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam lampiran 10.

Rekening

*Penampungan Akhir
Akhir Tahun (RPATA)*

F.1.2 Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA)

Satker Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Per 31 Desember 2025 terdapat Rekening Penampungan Akhir Tahun (RPATA) sesuai dengan PMK No.84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran. Adapun Mutasi Saldo Dana RPATA sebagai berikut :

- a) Saldo awal dana rekening penampungan berupa penyediaan dana RPATA sebagaimana tercantum pada SPM Penampungan berikut:

No	Nama Penyedia	Uraian Pekerjaan	Saldo Awal/Penampungan RPATA				
			SPM		SP2D		Nilai
			Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	
1	PT. MANDAKIRO WASTIRU PRATAMA	Pengadaan Jasa Cleaning Seris (Alih Daya)	18/12/2025	02605T	22/12/2025	259990302015424	177.125.430,00
2	PT. WIRA SANDI	Pengadaan Jasa Keamanan (Alih Daya)	18/12/2025	02604T	22/12/2025	259990302014238	887.438.045,00
3	PT. WIRA SANDI	Pengadaan Jasa Keamanan	18/12/2025	02606T	22/12/2025	259990302014182	1.276.348.057,00
4	PT. MANDAKIRO WASTIRU PRATAMA	Pengadn Jasa Cleaning Service	18/12/2025	02607T	22/12/2025	259990302014183	1.020.244.785,00
5	KIMIA FARMA DIAGNOST	Pelayanan Kesehatan Pegawai BPOM (Klinik BPOM)	17/12/2025	02601T	19/12/2025	259990302013245	16.665.000,00
Total							3.377.821.317,00

- b) Nilai pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana tercantum pada SP2D pembayaran berikut:

No	Nama Penyedia	Uraian Pekerjaan	SPM PEMBAYARAN RPATA				
			SPM		SP2D		
			Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor	Nilai
1	PT. MANDAKIRO WASTIRU PRATAMA	Pengadaan Jasa Cleaning Servis (Alih Daya)	07/01/2026	00042T	08/01/2026	261750000000658	177.125.430,00
2	PT. WIRA SANDI	Pengadaan Jasa Keamanan (Alih Daya)	07/01/2026	00040T	08/01/2026	261750000000655	858.513.300,00
3	PT. WIRA SANDI	Pengadaan Jasa Keamanan	07/01/2026	00039T	07/01/2026	261750000000528	1.276.348.057,00
4	PT. MANDAKIRO WASTIRU PRATAMA	Pengadaan Jasa Cleaning Service	07/01/2026	00043T	08/01/2026	261750000000659	1.020.244.785,00
5	KIMIA FARMA DIAGNOST	Pelayanan Kesehatan Pegawai BPOM (Klinik BPOM)	07/01/2026	00038T	07/01/2026	261750000000527	16.665.000,00
Total							3.348.896.572,00

- c) Terdapat saldo Penihilan RPATA sebesar Rp28.924.745,00 yang merupakan pengembalian ke Rekening Kas Negara akibat pengurangan jumlah personil jasa keamanan yang meninggal dunia berdasarkan SPM nomor 00041T tanggal 07 Januari 2026 dan SP2D nomor 261750000000656 tanggal 08 Januari 2026.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

*Pengelola Keuangan
Sekretariat Utama
BPOM*

F.2.1. Pengelola Keuangan Sekretariat Utama BPOM

- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 132 Tahun 2025 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan, per tanggal 4 Maret 2025 terdapat perubahan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan satker Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:

Semula	Menjadi
Ali Muharam, SIP, MSE, MA 19760103 200604 1 001	Dr.Ir. Antonius Tarigan, M.Si 19690403 199503 1 001

2. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.02.2.21.04.25.1294 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Penguji dan Peandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal penetapan 8 April 2025 sebagai berikut:

Keterangan	Nama
Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Indry Puspitasari, S.E

3. Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan No. HK.02.02.2.21.04.25.1293 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Kode Satker: 432731), per tanggal 15 Desember 2023 terdapat perubahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan satker Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 43

*Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Utama BPOM
Tahun Anggaran 2025*

Keterangan	Nama
Pejabat Pembuat Komitmen I	Titin Ernawati Fakhruddin SE
Pejabat Pembuat Komitmen II	Yulita Margaretha, S.Akun
Pejabat Pembuat Komitmen III	Ratna Sari, SE
Pejabat Pembuat Komitmen IV	Ni Made Ayu Rahmawati, SF, Apt, M.Farm
Pejabat Pembuat Komitmen V	Tri Kuswantoro, SE
Pejabat Pembuat Komitmen VI	Prima Solichatun, S.Si, Apt
Pejabat Pembuat Komitmen VII	Adek Yuliardi, SE
Pejabat Pembuat Komitmen VIII	Dedi Gunawan, S.TP
Pejabat Pembuat Komitmen IX	Rani Pamungkas, SAP
Pejabat Pembuat Komitmen X	Venny, S.Si., Apt
Pejabat Pembuat Komitmen XI	Bekti Dwi Anugerah Putri, SE
Pejabat Pembuat Komitmen XII	Kurniawan Norat, S.E., M.A.B

4. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan No. HK.02.02.2.22.01.24.09 Tahun 2024 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Satuan Kerja Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan tanggal penetapan 15 Januari 2024, yaitu sebagai berikut:

Tabel 44

*Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretariat Utama BPOM
Tahun Anggaran 2025*

Keterangan	Nama
Bendahara Pengeluaran	Erna Dwi Irawati, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu I	Annisa Eka Pratiwi, A.Md
Bendahara Pengeluaran Pembantu II	Caroline Disya Bening Pramudya, A.Md.Ak.
Bendahara Pengeluaran Pembantu III	Ni Luh Putu Arya Shinta A.S, A.Md.Akun
Bendahara Pengeluaran Pembantu IV	Trida Nessa, S.E.
Bendahara Pengeluaran Pembantu V	Yoga Muliawan Purwanto, A.Md.Ak
Bendahara Pengeluaran Pembantu VI	Naiva Tianli Ichsandhia, A.Md.Ak
Bendahara Pengeluaran Pembantu VII	Arin Anastasyah Sukma, A.Md.
Bendahara Pengeluaran Pembantu VIII	Gamas Aulia Rahmaputra, A.Md.Kb.N

Rekening Pemerintah

F.2.2. Rekening Pemerintah

Jumlah rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional satker Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 45

Rekening Pemerintah

No Rekening	Nama Rekening	Nama Cabang Bank	Nomor Izin	Tanggal Izin	Keterangan
8100124327311000	BPG 175 SET UTAMA BPOM	MANDIRI Percetakan Negara	S-628/PB.3/2020	05/10/2020	Bendahara Pengeluaran
8100124327311003	BPP 175 SETTAMA BPOM 03	MANDIRI Percetakan Negara	S-2120/WPB.12/KP.06/2021	13/09/2021	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8100124327311005	BPP 175 SETTAMA BPOM 05	MANDIRI Percetakan Negara	S-2120/WPB.12/KP.06/2021	13/09/2021	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8100124327311004	BPP 175 SETTAMA BPOM 04	MANDIRI Percetakan Negara	S-2120/WPB.12/KP.06/2021	13/09/2021	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8100124327311002	BPP 175 SETTAMA BPOM 02	MANDIRI Percetakan Negara	S-2120/WPB.12/KP.06/2021	13/09/2021	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8100124327311001	BPP 175 SETTAMA BPOM 01	MANDIRI Percetakan Negara	S-2120/WPB.12/KP.06/2021	13/09/2021	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8100124327311007	BPP 175 SETTAMA BPOM 07	MANDIRI Percetakan Negara	S-162/KPN.1206/2023	16/01/2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8100124327311006	BPP 175 SETTAMA BPOM 06	MANDIRI Percetakan Negara	S-3345/WPB.12/KP.06/2021	24/12/2023	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8100124327311008	BPP 175 SEKRETARIAT UTAMA BPOM 08	MANDIRI Percetakan Negara	S-1848/KPN.1206/2024	26/09/2024	Bendahara Pengeluaran Pembantu
2228255593	RPL 140 PDH BPOM UNTUK 2DNA9Q7A	BNI Cabang Percetakan Negara	000542	10/12/2025	RPL
2228255594	RPL 140 PDH BPOM UNTUK 2DNA9Q7A	BNI Cabang Percetakan Negara	000541	10/12/2025	RPL
9892624327312501	RPL 140 BPOM BPP 1	BNI Jakarta	S-597/KPN.1208/2025	23/12/2025	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9892624327312502	RPL 140 BPOM BPP 2	BNI Jakarta	S-597/KPN.1208/2025	23/12/2025	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9892624327312503	RPL 140 BPOM BPP 3	BNI Jakarta	S-597/KPN.1208/2025	23/12/2025	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9892624327312504	RPL 140 BPOM BPP 4	BNI Jakarta	S-597/KPN.1208/2025	23/12/2025	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9892624327312505	RPL 140 BPOM BPP 5	BNI Jakarta	S-597/KPN.1208/2025	23/12/2025	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9892624327312506	RPL 140 BPOM BPP 6	BNI Jakarta	S-597/KPN.1208/2025	23/12/2025	Bendahara Pengeluaran Pembantu
9892624327312507	RPL 140 BPOM BPP 7	BNI Jakarta	S-597/KPN.1208/2025	23/12/2025	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Nomor Pokok Wajib
Pajak

F.2.3. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digunakan dalam kegiatan operasional satker Sekretariat Utama BPOM yaitu 0001193978074000.

Penerimaan Hibah
Luar Negeri

F.2.4. Penerimaan Hibah Luar Negeri

Satker Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menerima Hibah Luar Negeri Berupa uang dari Gates Foundation sesuai *Grant Agreement* Nomor INV-094868 tanggal 2 Desember 2025 sebesar US 4.689.344 dan bila dikurskan sebesar Rp84.500.000.000,00 Hibah ini telah dilakukan register dengan nomor 2DNA9Q7A dan akan dilakukan proses pencairan dengan tiga tahapan sebagai berikut

NO	Tahapan Pencairan	Jumlah
1	31 Desember 2025	US\$ 2.500.000
2	September 2026	US\$ 1.250.000
3	Mei 2027	US\$ 939,344
TOTAL		US\$ 4.689.344

Satker Sekretariat Utama BPOM pada Tahun Anggaran 2025 telah melakukan pengesahan pendapatan sebesar Rp41.650.000.000,00 sesuai surat pengesahan penerimaan hibah langsung nomor 251400000001058 tanggal 31 Desember 2025. Pendapatan tersebut belum dilakukan transaksi belanja karena pelaksanaan kegiatan akan dilakukan di tahun 2026.

*Sewa Gedung,
Bangunan dan
Kendaraan
Operasional*

F.2.5. Sewa Gedung, Bangunan dan Kendaraan operasional

Selama periode Laporan Keuangan *Unaudited* TA 2025, Satker Sekretariat Utama BPOM telah melaksanakan perikatan sewa atas beberapa aset untuk mendukung operasional kegiatan. Adapun perincian atas hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 46

Sewa Gedung, Bangunan, dan Kendaraan Operasional

No	Uraian	Nomor Kontrak	Tgl. Kontrak	Tgl. Mulai	Tgl. Berakhir	Nilai Kontrak
1	Sewa Bangunan/ Gudang Furniture	PL.02.03.251.01.25.34	03/01/2025	05/01/2025	04/01/2026	548.251.200
2	Sewa Apartemen Kepala Biro Umum	PL.02.01.251.03.25.1861	05/03/2025	05/02/2025	04/03/2026	157.744.840,00
3	Sewa Kendaraan Pimpinan	EP- 01JTQB5ZFBNCNYPTW8S 74B24PE	27/05/2025	27/05/2025	26/05/2026	166.200.012,00
4	Sewa Kendaraan Pimpinan	EP- 01JTMW0DJKVG4B7EDE4 TJGJZ13	27/05/2025	27/05/2025	26/05/2026	397.200.000
5	Sewa Kendaraan Operasional/Pimpinan	EP- 01K41SD0RCEY9ZHJBFX9 3160JB8	10/09/2025	01/10/2025	01/10/2026	385.200.000
6	Sewa Kendaraan Operasional/Pimpinan	EP- 01JZ5C5NF17DRQP5Y5H N6D0154	03/07/2025	04/07/2025	03/07/2026	420.000.000
7	Sewa Gudang Barang Bukti	PL.02.01.25.252.10.25.855 4	10/10/2025	14/10/2025	14/10/2026	183.000.000
8	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Eselon I (Deputi I)	PL.02.03.251.08.25.7579	12/08/2025	12/08/2025	11/08/2026	251.500.000
9	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Eselon I (Deputi II)	PL.02.01.252.10.25.10005	31/10/2025	07/11/2025	06/11/2026	251.100.000
10	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Kepala BPOM	PL.02.03.251.08.25.7580	12/08/2025	23/08/2025	22/08/2026	882.000.000
11	Sewa Rumah Dinas Sestama	PL.02.01.252.10.25.9484	14/10/2025	14/11/2025	13/11/2026	161.112.000
12	Sewa Lahan Parkir	PL.02.03.251.12.24.11627	31/12/2024	01/01/2025	31/12/2025	1.575.000.000
Jumlah						5.378.308.052

*Hasil Inventaris Aset***F.2.6. Hasil Inventarisasi Aset**

Berdasarkan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan TA 2025, terdapat saldo BMN hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor (NUP 70) dengan nilai perolehan sebesar Rp19.899.324,00. Kehilangan tersebut telah dilaporkan melalui Surat Keterangan Nomor PL.03.09.25.06.25.93 tanggal 26 Juni 2025 kepada Tim Tuntutan Ganti Rugi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Tuntutan Ganti Rugi telah memberikan tanggapan melalui Laporan Hasil Penelusuran/Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor PL.03.11.7.12.25.182 tanggal 02 Desember 2025 yang menetapkan kewajiban ganti rugi kepada Sdri. Caroline Disya sebesar Rp15.200.000,00.

*Transaksi Resiprokal***F.2.7. Transaksi Resiprokal**

Transaksi resiprokal merupakan transaksi timbal balik antara Satker Pemberi Kerja-Belanja dengan Satker Penerima-Pendapatan yang berasal dari entitas akuntansi pelaporan dalam satu entitas pemerintahan. Transaksi resiprokal di BPOM berupa saker *intraco*, nilai rupiah, skema pembayaran (uang persediaan/pembayaran langsung)/ skema penyetoran (Setor ke kas negara/potong SPM), serta penjelasan umum atas pekerjaan. Transaksi resiprokal pada Satuan Kerja Sekretariat Utama BPOM untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 47

*Perincian Transaksi Resiprokal
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025
(dalam rupiah)*

Satker Pengirim	Belanja	Satker Penerima	Pendapatan	Keterangan
Sekretariat Utama BPOM	150.000,00	BKN Pusat	150.000,00	Biaya ujian penyesuaian ijazah
Sekretariat Utama BPOM	150.000,00	BKN Pusat	150.000,00	Biaya ujian penyesuaian ijazah
Sekretariat Utama BPOM	150.000,00	BKN Pusat	150.000,00	Biaya ujian penyesuaian ijazah
Sekretariat Utama BPOM	300.000,00	BKN Pusat	300.000,00	Biaya ujian penyesuaian ijazah
Total Belanja	750.000,00	Total Pendapatan	750.000,00	

*Program Prioritas
Nasional Tahun 2025*

F.2.8. Program Prioritas Nasional Tahun 2025

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Pada Satuan kerja Sekretariat Utama terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari Prioritas Nasional yang terdapat pada Satuan Kerja Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

- a) **PN-02 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.**

Pelaksanaanya diantaranya melalui 1 Program Prioritas, 1 kegiatan prioritas di Satuan Kerja Sekretariat Utama dengan pagu sebesar

Rp662.620.000,00 dan realisasi sebesar Rp 138.792.767,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kementerian/Lembaga : (063) BPOM
 Unit Organisasi : (01) BPOM
 Satuan Kerja : Sekretariat Utama

Tabel 48

Prioritas Nasional II

Program / Kegiatan Prioritas	Belanja			Output			
	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%
Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	662,620,000.00	138,792,767.00	20.95	1	1	Lembaga	100.00

Capaian Output

F.2.9. Capaian Output

Selama periode 31 Desember 2025, output strategis yang dicapai oleh Sekretariat Utama dapat dilihat pada lampiran 11.

SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LAMPIRAN CALK

REVISI DIPA TA 2025

No	No. DIPA	Revisi ke	Tanggal Revisi	Pagu	Keterangan
1	DIPA-063.01.1.432731/2025	1	22 Feb 2025	674,848,879,000.00	Revisi Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berupa revisi pemenuhan blokir efisiensi Badan POM
2	DIPA-063.01.1.432731/2025	2	21 Mar 2025	679,484,097,000.00	Revisi DIPA pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) berupa revisi perubahan kode blokir A (efisiensi) pada hal IV DIPA, pergeseran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan honorarium PPNPN dan pergeseran anggaran antar Saker/KRO/RO
3	DIPA-063.01.1.432731/2025	3	24 Apr 2025	679,484,097,000.00	Revisi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 2025 berupa revisi DIPA Sekretariat Utama BPOM dalam rangka penyesuaian RPD Triwulan II
4	DIPA-063.01.1.432731/2025	4	7 May 2025	679,484,097,000.00	Revisi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berupa revisi anggaran KRO dan revisi anggaran antar jenis belanja
5	DIPA-063.01.1.432731/2025	5	28 May 2025	679,484,097,000.00	Revisi DIPA pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berupa revisi yang mengakibatkan perubahan jumlah pagu akun perjalanan dinas (524)
6	DIPA-063.01.1.432731/2025	6	1 Jul 2025	679,484,097,000.00	Revisi KPA untuk pemutakhiran data dalam rangka menyamakan data dengan SPAN
7	DIPA-063.01.1.432731/2025	7	7 Jul 2025	781,195,190,000.00	Revisi DJA dikarenakan pemenuhan belanja pegawai melalui relaksasi blokir
8	DIPA-063.01.1.432731/2025	8	15 Jul 2025	781,195,190,000.00	Revisi Kanwil DJPB dikarenakan adanya penyesuaian RPD TW III
9	DIPA-063.01.1.432731/2025	9	21 Jul 2025	781,195,190,000.00	Revisi DJA dikarenakan adanya pemutakhiran data dalam rangka realokasi pemenuhan kebutuhan belanja operasional satker UPT
10	DIPA-063.01.1.432731/2025	10	1 Aug 2025	779,376,940,000.00	Revisi DJA untuk pemutakhiran data dalam rangka menyamakan data dengan SPAN
11	DIPA-063.01.1.432731/2025	11	16 Oct 2025	779,376,940,000.00	Revisi Kanwil untuk Rencana Penarikan Dana TW IV dan Pemutakhiran POK
12	DIPA-063.01.1.432731/2025	12	21 Oct 2025	779,376,940,000.00	Revisi KPA untuk Revisi Pemutakhiran POK
13	DIPA-063.01.1.432731/2025	13	3 Nov 2025	778,590,550,000.00	Revisi DJA untuk Revisi Pemenuhan belanja Operasional Badan POM
14	DIPA-063.01.1.432731/2025	14	13 Nov 2025	778,590,550,000.00	Revisi KPA untuk Revisi Pemutakhiran POK
15	DIPA-063.01.1.432731/2025	15	21 Nov 2025	778,590,550,000.00	Revisi KPA untuk Revisi Pemutakhiran POK
16	DIPA-063.01.1.432731/2025	16	9 Dec 2025	778,590,550,000.00	Revisi KPA untuk Revisi Pemutakhiran POK
17	DIPA-063.01.1.432731/2025	17	12 Dec 2025	778,590,550,000.00	Revisi KPA untuk Revisi Pemutakhiran POK

No	Uraian	No. Dokumen (SP2d/NTPN)	Tgl Dokumen	Nilai
1	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep2, tukin Mei 2022 an Nurhaeti Sektama, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj. keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3, tunj. struktural november-desember 2024 an. Rizkal Dep4.	251751502000003	01-Jan-25	2,249,564
2	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep2, tukin Mei 2022 an Nurhaeti Sektama, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3, tunj. struktural Nov-Des 2024 an. Rizkal Dep4, tunj. suami dan tunj. beras Des 2024 an. Dwi Ariani Dep1.	251751502000042	01-Feb-25	2,679,084
3	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep2, tukin Mei 2022 an Nurhaeti Sektama, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj. keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3, tunj. struktural Nov-Des 2024 an. Rizkal Dep4.	251751502000143	01-Mar-25	2,249,564
4	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tukin Mei 2022 an Nurhaeti Sektama, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	251751502000375	01-Apr-25	521,787
5	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep2.	251751502000376	01-Apr-25	227,777
6	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep2, tukin Mei 2022 an Nurhaeti Sektama, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	251751502000515	01-May-25	749,564
7	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep2, tukin Mei 2022 an Nurhaeti Sektama, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	251751502000599	01-Jun-25	749,564
8	Penerimaan atas potongan akun pembulatan pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Maret 2021-Desember 2024 untuk 4 pegawai an. Dyah Ariyani dkk pada satker Sekretariat Utama (Deputi 1 dan Deputi 4)	251751302009034	02-Jun-25	1,332
9	Penerimaan atas potongan akun pembulatan pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Oktober 2022 - Desember 2024 untuk 3 pegawai an. Lili dkk pada satker Sekretariat Utama	251751302009045	02-Jun-25	929
10	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep1, tunj. fungsional Juni-Juli 2024 Susanty Dep1, tukin Mei 2022 an Nurhaeti Sektama, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	251751502000798	01-Jul-25	956,706
12	Penerimaan atas potongan akun pembulatan pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji September s.d Desember 2024 untuk 1 pegawai an Rona Monika pada Satker Deputi 2	251751302010152	12-Jun-25	200
13	Penerimaan atas potongan akun pembulatan pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Oktober 2023 - Desember 2024 untuk 1 pegawai an. Sri Wahyuningsih pada satker Sekretariat Utama	259991320033864	19-Jun-25	606
14	Penerimaan atas pengembalian belanja tunjangan fungsional juli 2024 an. Nurlaila pada Deputi 1	0C2E555DFIP1TLI4	11-Jun-25	1,175,000
15	Penerimaan atas pengembalian belanja tunjangan suami dan beras bulan Juli 2021-Desember 2024 an. Lasrida pada Deputi 3	4E2127QLV2GKLQH7	24-Jun-25	27,181,780
16	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep1, tunj. fungsional Juni-Juli 2024 Susanty Dep1, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	259991529005171	1-Agu-25	796,805
17	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep1, tunj. fungsional Juni-Juli 2024 Susanty Dep1, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	259991529013400	01-Sep-25	796,805
18	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep1, tunj. fungsional Juni-Juli 2024 Susanty Dep1, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	259991529019721	01-Oct-25	796,805
19	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep1, tunj. fungsional Juni-Juli 2024 Susanty Dep1, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	259991529024220	01-Nov-25	796,805
20	Penerimaan atas potongan akun pembulatan pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Maret-Desember 2024 untuk 1 Pegawai/4 Jiwa pada Satker Deputi 2	259991320595465	10-Nov-25	30
21	Penerimaan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa tunj.jabatan Desember 2022 sd Januari 2023 Rr Maya Gustina Dep1, tunj. fungsional Juni-Juli 2024 Susanty Dep1, Gaji Pokok Des 20 - Feb23 an Yustisi Dani Dep3, tunj.keluarga Okt21- Des22 an Mafira Putri Dep3.	259991529032115	01-Dec-25	796,805
TOTAL				42,727,512

**Perincian Pengembalian Belanja Pegawai
untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025**

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Nilai
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	AF0716R6FE29BT5K	07-May-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan Mei 2025 an. Ema Setyawati pada Satker Deputy 3	8,328,200.00
		A44B052BFPR0RJFT	10-Jun-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan Mei 2025 an. Yeni Meisyaroh pada Satker Deputy 4	3,077,509.00
		251751502000798	01-Jul-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan Maret-Mei, Gaji 13 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputy 2	637,320.00
		259991529005171	01-Aug-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan Maret-Mei, Gaji 13 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputy 2	637,320.00
		259991529013400	01-Sep-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan Maret-Mei, Gaji 13 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputy 2	637,320.00
		770DF2D30D0I3KM5	17-Sep-25	Pengembalian Belanja Gaji pokok PNS bulan Juni sd Juli 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputy 2	12,746,400.00
		81AA852BFSPQ3HPF	25-Sep-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan September 2025 an. Adin Wira (Tubel) pada Satker Deputy 4	1,660,700.00
		259991529019721	01-Oct-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan Maret-Mei, G13 2025 an Randi Dian pada Deputy 2	637,320.00
		42D666R6FILQSB63	02-Oct-25	PengembaBelanja Gaji Pokok bulan September 2025 an. Tiffany Sasmitha (Tubel LN) pada satker Deputy 2	1,593,300.00

		93A248K1F7T9IFHD	14-Oct-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok bulan Oktober 2025 an. Adin Wira (Tubel LN) pada satker Deputy 4	1,660,700.00
		259991529024220	01-Nov-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok bulan Agst-Okt25 pada Deputy 1 an. Erlina Fitriyani	1,366,620.00
		AAADF2D30ETC0020	21-Nov-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok bulan November 2025 an. Yulian Dwi pada Satker Deputy 4	2,873,500.00
		259991529032115	01-Dec-25	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS bulan Maret-Mei,G13 2025 an Randi Dian pada satker Deputy 2	637,320.00
T O T A L					36,493,529.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	259991320032394	18-Jun-25	Pengembalian Pembulatan Gaji THR Tahun 2025 pada Satker Deputy 1 dan Deputy 2	56.00
		251751302001945	25-Feb-25	Pengembalian Pembulatan Gaji bulan Januari-Februari pada Satker Deputy1, Deputy 2, Deputy 3, Deputy 4 dan Sekretariat Utama	951.00
		251751302006303	30-Apr-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS THR 2025 untuk 43 pegawai pada Satker Deputy 2	478.00
		251751302005323	16-Apr-25	Pengembalian Pembulatan Gaji THR Tahun 2025 pada Satker Sekretariat Utama, Deputy 1, Deputy 3 dan Deputy 4	608.00
		251751302005283	16-Apr-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan Januari-April 2025 pada Satker Sekretariat Utama, Deputy 1, Deputy 3 dan Deputy 4	3,657.00
		251751302006304	30-Apr-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan April 2025 untuk 6 Pegawai pada Satker Deputy 2	106.00
		251751302006306	30-Apr-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan April 2025 untuk 76 Pegawai pada Satker Deputy 2	919.00

251751302007792	19-May-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Maret s.d Desember 2024 untuk 1 Pegawai/1 Jiwa a.n Ema Setyawati pada Satker Deputi 3	680.00
251751302007794	19-May-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Januari s.d Mei 2025 untuk 2 Pegawai/3 Jiwa pada Satker Sekretariat Utama	289.00
259991320033866	19-Jun-25	Pengembalian Pembulatan Gaji Januari-Juni Tahun 2025 pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Januari - Juni 2025 untuk 8 pegawai/ 26 jiwa pada satker Sekretariat Utama (Kedeputian 1,3,4)	268.00
259991320020890	16-Jun-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Maret s.d Juni 2025 untuk 21 Pegawai/53 Jiwa pada Satker Sekretariat Utama dan Deputi 3	158.00
251751302010153	12-Jun-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan Juni 2025 10 Pegawai pada Satker Deputi 2	250.00
259991320033865	19-Jun-25	Pengembalian Pembulatan Gaji ke-13 Tahun 2025 pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Ke-13 Tahun 2025 untuk 11 Pegawai/32 Jiwa pada Satker Sekretariat Utama (Sektama, Kedeputian 1,3,4)	124.00
259991320141153	18-Jul-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Juni-Juli Tahun 2025 untuk 10 Pegawai/23 Jiwa pada Satker Sekretariat Utama dan Deputi 3	220.00
259991320249287	20-Aug-25	Pengembalian Pembulatan Gaji April-Agustus Tahun 2025 pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji April-Agustus 2025 untuk 13 pegawai/ 36 jiwa pada satker Sekretariat Utama (Sektama, Kedeputian 1,2,3,4)	493.00

259991320256406	21-Aug-25	Potongan Pengembalian Pembulatan Gaji ke-13 Tahun 2025 pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 untuk 2 pegawai/ 6 jiwa pada satker Sekretariat Utama (Kedeputian 1 dan 2)	60.00
259991320349774	15-Sep-25	Pengembalian Pembulatan Gaji Agustus-September 2025 pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Agustus-September 2025 untuk 9 pegawai/ 21 jiwa pada satker Sekretariat Utama (Kedeputian 1,4)	200.00
259991320344423	12-Sep-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Agustus-September 2025 untuk 7 pegawai/ 19 jiwa pada satker Sekretariat Utama	19.00
770DF2D30D0I3KM5	17-Sep-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan Juni sd Juli 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputi 2	162.00
259991320473773	14-Oct-25	Pengembalian belanja Pembulatan Gaji PNS bulan Februari-Maret 2025 pada Satker Sekretariat Utama dan Deputi 3	376.00
259991320473774	14-Oct-25	Pengembalian belanja Pembulatan Gaji PNS bulan September-Oktober 2025 pada Satker Sekretariat Utama dan Deputi 3	188.00
259991320486405	16-Oct-25	Pengembalian belanja Pembulatan Gaji PNS bulan Januari-Oktober 2025 pada Satker Sekretariat Utama (Deputi 1 dan Deputi 2)	49.00
259991320489826	17-Oct-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada THR 2025 di Satker Sekretariat Utama(Deputi 3)	506.00
259991320608417	11-Nov-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada THR 2024 pada Satker Deputi 2	24.00
259991320608416	11-Nov-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS pada Gaji13 tahun 2024 pada Satker Deputi 3	24.00

		259991320628631	14-Nov-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji THR Tahun 2025 pada satker Sekretariat Utama (Kedeputian 1 dan 2)	110.00
		259991320628630	14-Nov-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Ke-13 Tahun 2025 pada satker Sekretariat Utama (Deputi 1 dan 2)	110.00
		259991320628628	14-Nov-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji Januari-Noveber 2025 pada satker Sekretariat Utama (Sektama dan Kedeputian 1,2,3,4)	482.00
		AAADF2D30ETC0020	21-Nov-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan November 2025 an. Yulian Dwi pada Satker Deputi 4	88.00
		259991320777130	09-Dec-25	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS bulan November 2025 an. Linda pada Satker Deputi 1	406.00
		T O T A L			12,061.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	251751502000042	01-Feb-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami bulan Januari 2025 an Dwi Ariani pada Satker Deputi 1	357,100.00
		251751502000143	01-Mar-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami bulan Februari 2025 an. Nurjaya pada Satker Deputi 4	528,980.00
		7E0390K80L4O2N2B	24-Jun-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami PNS bulan bulan Jan-Juni 2025 an. Lasrida pada Satker Deputi 3	4,474,880.00
		251751502000798	01-Jul-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Istri bulan Maret-Mei, Gaji 13 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputi 2	63,732.00
		259991529005171	01-Aug-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Istri bulan Maret-Mei, Gaji 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputi 2 dan Tunjangan Suami bulan Juni-Juli 2025 an. Maya Kurniawati pada Satker Deputi 3	316,542.00

		259991529013400	01-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Istri bulan Maret-Mei, Gaji 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputy 2 dan Tunjangan Suami bulan Juni-Juli 2025 an. Maya Kurniawati pada Satker Deputy 3	316,542.00
		770DF2D30D0I3KM5	17-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. Suami PNS bulan Juni sd Juli 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputy 2	1,274,640.00
		259991529019721	01-Oct-25	Pengembalian Belanja Tunj. Istri bulan Maret-Mei, G13 2025 an Randi Dian Deputy 2 dan Tunj. Suami Juni-Juli 2025 an. Maya Kurniawati Deputy 3	316,542.00
		259991529024220	01-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunj. Istri bulan Maret-Mei, G13 2025 an Randi Dian Deputy 2 , Tunj. Suami Juni-Juli 2025 an. Maya Kurniawati Deputy 3 dan Tunj. Suami Agst-Okt25 Dep1 an. Erlina Fitriyani	389,472.00
		AAADF2D30ETC0O2O	21-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunj. suami bulan November 2025 an. Yulian Dwi pada Satker Deputy 4	287,350.00
		259991529032115	01-Dec-25	Pengembalian Belanja Tunj. Istri bulan Maret-Mei, G13 2025 an Randi Dian Deputy 2 dan Tunj. Suami Juni-Juli 2025 an. Maya Kurniawati Deputy 3	316,542.00
		DBBFC39GGA8G3FTP	04-Dec-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Suami bulan Agustus-Oktober 2025 an. Desy Resmiyati pada satker Deputy 2	857,640.00
T O T A L					9,499,962.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	251751502000798	01-Jul-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak bulan Maret-Mei, Gaji 13 Tahun 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputy 2	12,746.00
		259991529005171	01-Aug-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Anak bulan Maret-Mei, Gaji 13 Tahun 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputy 2	12,746.00

		259991529013400	01-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. Anak bulan Maret-Mei, Gaji 13 Tahun 2025 an. Randi Dian pada Satker Deputy 2	12,746.00
		259991529019721	01-Oct-25	Pengembalian Belanja Tunj. Anak Maret-Mei, G13 2025 an. Randi Dian pada Deputy 2	12,746.00
		259991529024220	01-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunj. Anak Maret-Mei, G13 2025 an. Randi Dian pada Deputy 2 dan Tj.Anak Agst-Okt25 pada Deputy 1 an. Erlina Fitriyani	27,332.00
		259991529032115	01-Dec-25	Pengembalian ke 6/10 Tunjangan Anak Maret-Mei, G13 2025 an. Randi Dian Deputy 2	12,746.00
T O T A L					91,062.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	9135F0K80HDGPSLL	24-Feb-25	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS bulan Februari 2025 an. Azis pada satker Deputy 4	3,250,000.00
		251751302005283	16-Apr-25	Pengembalian Tunjangan Struktural bulan Maret-April 2025 pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Januari - April 2025 untuk 266 pegawai/ 591 jiwa pada satker Sekretariat Utama (Sektama, Kedeputian 1,3,4)	1,080,000.00
		251751302005323	16-Apr-25	Pengembalian Tunjangan Struktural THR 2025 pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji THR Tahun 2025 untuk 52 pegawai/ 139 jiwa pada satker Sekretariat Utama (Sektama, Kedeputian 1,3,4)	540,000.00
		6E1D645U04QSGFK0	09-Dec-25	Pengembalian Tunjangan Struktrual bulan Oktober 2025 an. Rustyawati pada satker Deputy 2	1,225,000.00
T O T A L					6,095,000.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	251751502000143	01-Mar-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan Februari 2025 an. Husni pada Satker Deputy 1	375,000.00
		77AAD2D30977V9EA	09-May-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan Maret 2025 an. Ronald pada Satker Sekretariat Utama(BBPOM Semarang)	1,175,000.00
		A56637NJV8OHPP38	19-May-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan April 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputy 2	1,400,000.00
		776A06R6FE3609EL	09-May-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan April 2025 an. Ronald pada Satker Sekretariat Utama (BBPOM Semarang)	1,175,000.00
		BEDB21GLGENQUP2N	19-May-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan Mei 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputy 2	1,400,000.00
		F11A46R6FF3V7FK1	19-Jun-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan Mei 2025 an. Dyah Ariyani Deputy 4	1,260,000.00
		259991529005171	01-Aug-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan Mei 2025 an. Tri Windarsih pada Satker Deputy 1	500,000.00
		770DF2D30D0I3KM5	17-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan Juni sd Juli 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputy 2	2,800,000.00
		259991529013400	01-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS bulan Mei 2025 an. Tri W pada Deputy 1 dan bulan Mei-Agustus 2025 an. Singih Prabowo pada Satker Sekretariat Utama	560,417.00
		259991529019721	01-Oct-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional bulan Mei-Agustus 2025 an. Singih Prabowo pada satker Sekretariat Utama	60,417.00
		259991320486405	16-Oct-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional bulan Oktober 2025 an. Imelda pada satker Deputy 2	1,260,000.00
		259991529024220	01-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional bulan Mei-Agustus 2025 an. Singih Prabowo pada satker Sekretariat Utama	60,417.00

		C3BFB39GG9FODO33	21-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional Oktober-November 2025 an. Lucky Hayati Deputy 4	2,350,000.00
		AAADF2D30ETC002O	21-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunj.Fungsional bulan November 2025 an. Yulian Dwi pada Satker Deputy 4	325,000.00
		259991529032115	01-Dec-25	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional bulan Mei-Agustus 2025 an. Singgih Prabowo pada satker Sekretariat Utama	60,417.00
T O T A L					14,761,668.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	770DF2D30D0I3KM5	17-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS bulan Juni sd Juli 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputy 2	299,440.00
T O T A L					299,440.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	251751502000042	01-Feb-25	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS bulan Januari 2025 an. Dwi Ariani pada Satker Deputy 1	72,420.00
		251751502000143	01-Mar-25	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS bulan Februari 2025 an. Nurjaya pada Satker Deputy 4	72,420.00
		7E0390K80L4O2N2B	24-Jun-25	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS bulan Jan-Juni 2025 an. Lasrida pada Satker Deputy 3	579,360.00
		259991529005171	01-Aug-25	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS bulan Juni-Juli, Gaji 13 tahun 2025 an. Maya Kurniawati pada Satker Deputy 3	43,452.00
		770DF2D30D0I3KM5	17-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS bulan Juni sd Juli 2025 an. Reri Indriani pada Satker Deputy 2	289,680.00
		259991529013400	01-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS bulan Juni-Juli, Gaji 13 tahun 2025 an. Maya Kurniawati pada Satker Deputy 3	43,452.00

		259991529019721	01-Oct-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras bulan Juni-Juli, G13 2025 an. Maya Kurniawati pada satker Deputy 3	43,452.00
		259991529024220	01-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras bulan Juni-Juli, G13 2025 an. Maya Kurniawati pada satker Deputy 3	43,452.00
		AAADF2D30ETC0020	21-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunj.Beras bulan November 2025 an. Yulian Dwi pada Satker Deputy 4	144,840.00
		259991529032115	01-Dec-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras bulan Juni-Juli, G13 2025 an. Maya Kurniawati pada satker Deputy 3	43,452.00
		DBBFC39GGA8G3FTP	04-Dec-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Beras bulan Agustus-Okttober 2025 an. Desy Resmiyati pada satker Deputy 2	217,260.00
T O T A L					1,593,240.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511129	Belanja Uang Makan PNS			Pengembalian Belanja Uang Makan PNS bulan Mei 2025 sebanyak 1 hari an. Antonius Tarigan pada Satker Sekretariat Utama	41,000.00
		A0F9E6R6FF5ETN3T	24-Jun-25		
T O T A L					41,000.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	251751302010153	12-Jun-25	Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS bulan Juni 2025 untuk 10 Pegawai pada Satker Deputy 2	925,000.00
		259991320344423	12-Sep-25	Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Agustus-September 2025 untuk 7 pegawai/ 19 jiwa pada satker Sekretariat Utama	185,000.00

251751302005283	16-Apr-25	Pengembalian Tunjangan Umum PNS bulan April 2025 an. Shinta Anggraini pada Satker Deputy 4	185,000.00
251751302006303	30-Apr-25	Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS THR 2025 untuk 43 Pegawai pada Satker Deputy 2	370,000.00
259991320033866	19-Jun-25	Pengembalian Tunjangan Umum PNS bulan Mei-Juni Tahun 2025 an. Muhamad Harun pada Satker Deputy 4	370,000.00
259991320033865	19-Jun-25	Pengembalian Tunjangan Umum PNS pada Gaji-13 tahun 2025 an. Muhamad Harun pada Satker Deputy 4	185,000.00
259991320141153	18-Jul-25	Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS pada Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Juni-Juli Tahun 2025 untuk 10 Pegawai/23 Jiwa pada Satker Sekretariat Utama dan Deputy 3	370,000.00
259991320249287	20-Aug-25	Pengembalian Tunjangan Umum PNS bulan Agustus 2025 an. Iswadi pada satker Deputy 1 dan Pengembalian Tunjangan Umum PNS bulan Juli-Agustus 2025 an. Widya Cahyaningtyas pada satker Deputy 2	560,000.00
259991320473774	14-Oct-25	Pengembalian Belanja Tunj. Umum PNS bulan September-Oktober 2025 pada satker Sekretariat Utama dan Deputy 3	370,000.00
259991320486405	16-Oct-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum bulan September-Oktober 2025 an. Erlina Fitriyani, Joan, dan Anselma pada satker Deputy 1	925,000.00
259991320628628	14-Nov-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum bulan November 2025 an. Linda pada satker Deputy 1	185,000.00

		259991320777130	09-Dec-25	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum bulan November 2025 an. Linda pada satker Deputy 1	740,000.00
T O T A L					5,370,000.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
512411	Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/Keg/Kinerja)	6D77E5UOVGRR7SG9	25-Feb-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Januari 2025 an. Arini A pada Satker Sekretariat Utama	22,976.00
		980FA52BFM9EQSGU	25-Feb-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Januari 2025 an. Florina dan Rike pada Satker Sekretariat Utama(BBPOM Pontianak)	72,456.00
		7DECB39GG1S7FFSM	03-Mar-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Februari 2025 an. Theza Erly pada Satker Sekretariat Utama(Loka POM Mabar)	22,976.00
		CD53C6R6FCB4R9EQ	25-Mar-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Januari2025 an. Ardianto pada Satker Sekretariat Utama (BBPOM Aceh)	22,976.00
		FC8871GLGDNKQ8TE	14-Apr-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Maret 2025 an. Anita Augusta pada Satker Sekretariat Utama (BPOM Ambon)	98,960.00
		AE8AC2D309916PO5	16-May-25	Pengembalian Belanja Pegawai atas pembayaran kekurangan tukin September 2024 an. Rida sesuai SPM no.00062T tgl. 17/1/2025 pada Satker Sekretariat Utama	878,942.00
		BB72B6R6FE29BT7P	06-May-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Februari 2025 untuk 2 pegawai pada Satker Sekretariat Utama (BBPOM Palangkaraya)	59,584.00
		8489F45TVUF05P1R	19-May-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan April 2025 an. Ali M pada Satker Sekretariat Utama	19,280,000.00
		3D4790K80K1IGT6M	06-May-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan April 2025 an. Elida pada Satker Inspektorat Utama	59,792.00

26F2345TVV8KEJGQ	05-Jun-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Mei 2025 an. Tamran Ismail pada Satker Sekretariat Utama (BPOM Ambon)	54,680.00
56A917NJV9I62JI0	11-Jun-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Mei 2025 an. Wiwin Winarto pada Satker Sekretariat Utama (BBPOM Surabaya)	3,132,760.00
09DE40K80LRMF5P4	01-Jul-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Juni 2025 an. Ferista S pada Satker PPSDM	405,550.00
1B9126R6FGS9V7QJ	08-Aug-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Juli 2025 an. Ferista S pada Satker PPSDM	403,522.00
8CF5645U013UIEV2	05-Aug-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Juli 2025 an. Seri Rahayu pada Satker P3OMN	2,063,250.00
259991529013400	01-Sep-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Mei 2025 an. Singgih pada pembayaran gaji induk September 2025 Satker Sekretariat Utama	171,937.00
259991529019721	01-Oct-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Mei 2025 an. Singgih pada pembayaran gaji induk Oktober 2025 Satker Sekretariat Utama	171,937.00
5233D1GLGJBM10CJ	17-Oct-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan September 2025 an. Pratwi Yuniarti	37,370.00
259991529024220	01-Nov-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Mei 2025 an. Singgih pada pembayaran gaji induk November 2025 Satker Sekretariat Utama	171,937.00
050285UOVP2O1IJI	06-Nov-25	Pengembalian Tunjangan Kinerja Mei 2025 a.n. Ritti Piany Sangadji, S.Si., M.P.H.	91,903.00
259991529032115	01-Dec-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan Mei 2025 an. Singgih pada pembayaran gaji induk Desember 2025 Satker Sekretariat Utama	171,937.00
7DA0952BFVFUQ9C2	15-Dec-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tunkin bulan Januari 2025 an Hendria dan Dewi pada satker BBPOM Medan	276,222.00

		325051GLGL5GHRTJ	10-Dec-25	Pengembalian Belanja Pegawai berupa Tukin bulan November an. Bedri Sekar Nurmadhani pada UPT Mandiri Tabalong	1,838,060.00
T O T A L					29,509,727.00

total pengembalian belanja Pegawai

103,766,689.00

Perincian Pengembalian Belanja Barang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Nilai
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	F5E4D1GLGEIOOFP8	02-May-25	Pengembalian Belanja Honor Pengelola Keuangan Sekretariat Utama bulan Maret 2025 an. Ali Muharam, S.IP.,M.S.E.,M.A, dkk	2,975,000.00
		951777NJV9K8RF64	12-Jun-25	Pengembalian Belanja Honor Tim UAPA Jan-April 2025 dan Honor tim UAKPA April 2025 an. Rafika Agusriana dkk	3,036,000.00
		9008D0K80M05JE0F	17-Jul-25	Pengembalian Belanja Honor Pengelola Keuangan Sekretariat Utama bulan Mei 2025 an. a.n. Fadila Utami	285,000.00
		10F3D0K80ONPTFGG	15-Oct-25	Pengembalian Belanja Honor Pengelola Keuangan Sekretariat Utama an. Antonius Tarigan	237,500.00
		T O T A L			

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Nilai
521211	Belanja Bahan			Pengembalian kelebihan atas pertanggungjawaban KKP atas pembayaran	
		E03A37NJVEDP96II	27-Nov-25	belanja bahan	834,186.00
T O T A L					834,186.00

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Nilai
522151	Belanja Jasa Profesi	619C10K80PQM16GE	27-Nov-25	Pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa profesi untuk narasumber	80,000.00

T O T A L	80,000.00
------------------	------------------

Kode Akun	Nama Akun	Nomor Dokumen	Tanggal Dokumen	Uraian	Pengembalian Belanja
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			Pengembalian belanja perjalanan dinas ke Inhu, Pekanbaru dan Jakarta a.n. Renggo Triwijoyo, dkk (ROUM PBJ)	
		FCE3E5UOVGRR7SFF	25-Feb-25		611,500.00
		602F06R6FBFDQNE0	28-Feb-25	Pengembalian perjalanan dinas an Rafika dkk (11 orang) sesuai ST no. 27-29 tanggal 13 Februari 2025	4,435,500.00
		8327052BFMAL0ND5	28-Feb-25	Pengembalian belanja perjalanan dinas an Rafika dkk (11 orang) sesuai ST no. 27-29 tanggal 13 Februari 2025	1,969,500.00
		4486F7NJV6TH89CA	21-Mar-25	Pengembalian belanja perjalanan dinas an prima solichatun dkk (15 org)	6,814,799.00
		9D90245TVSKS81JE	24-Mar-25	Pengembalian belanja Perjalanan Dinas Biasa an. Hobie Dzikry Illahi (PKP)	63,600.00
		D3BC96R6FCC1F1HM	24-Mar-25	Pengembalian belanja Perjalanan Dinas Biasa an. Jayadi dkk (5 orang) sesuai surat tugas nomor 9-70 tanggal 21 Januari 2025 (PKP)	13,731,150.00
		1B4291GLGDNKQ8VQ	11-Apr-25	Pengembalian belanja Perjalanan dinas ke Semarang a.n. Rizky Ridho Eko Prabowo, dkk (2 orang)	590,000.00
		9602D6R6FD5V88UU	11-Apr-25	Pengembalian belanja Perjalanan Dinas a.n Poppy alia dkk (14 orang) sesuai Surat Tugas no 02.25.207 s.d 208 tgl 26 Februari 2025 (RT)	2,452,300.00
		4E5087NJV8LID9G0	14-May-25	Pengembalian belanja Perjadin an ananda sekar rahmi dkk (6 org)	1,591,889.00
		51FDE0K80K0CBG0F	05-May-25	Pengembalian belanja Perjalanan Dinas Biasa Penataan Organisasi UPT BPOM an Kurniawan Norat, dkk (2 orang)	143,000.00
		7E3FE7NJV8LID9G7	14-May-25	Pengembalian Belanja Perjalanan dinas an Andrea damayanti dkk (2 org) sesuai ST No 79-209 tgl 11/3/25	255,250.00

		Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas an Kurniawan Norat,S.E., M.B.A., dkk (2 Orang) sesuai Surat Tugas Nomor OT.01.02.22.05.25.104 tanggal 16 Mei 2025(Hukor)	1,308,500.00
		Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas an.Nani Mardiah, S.Farm, Apt, dkk (3 Orang) sesuai Surat Tugas Nomor 91 sd 102 tanggal 25 April 2025(Hukor)	650,860.00
		Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas ke Denpasar-Buleleng dan Tabalong a.n Dine Puspita sari dkk (3 orang) sesuai ST No 575-576 tanggal 11 Juni 2025"	416,000.00
		Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa ke Denpasar-Buleleng dan Tabalong a.n Henri Agus Kurniawan dkk	507,006.00
		Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa an. Jayadi dkk (2 orang) sesuai surat tugas nomor 128-883 tanggal 22 Agustus 2025 (PKP)	7,510,600.00
		Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas biasa an. Denny Alan, S.Kom, dkk (2 org)	750,002.00
T O T A L			43,801,456.00

total pengembalian belanja barang

51,249,142.00

[illegible]

[illegible]

REKAP BELANJA SEWA DIBAYAR DIMUKA TAHUN 2025

No	Uraian	Nama Supplier	Nomor Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir	Jumlah Hari	Jumlah Hari s.d. 31 Des 2025	Nilai Kontrak	Nilai per hari	Biaya Sewa sd 31 Des 2025	Saldo Belanja sewa dibayar dimuka
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sewa Bangunan/ Gudang Furniture	PT. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG	PL.02.03.251.01.25.34	03 Januari 2025	05 Januari 2025	04 Januari 2026	365	361	548,251,200	1,502,058	542,242,968	6,008,232
2	Sewa Apartemen Kepala Biro Umum	VITO FILBERT JAYALIE	PL.02.01.251.03.25.1861	05 Maret 2025	05 Maret 2025	04 Maret 2026	365	302	157,744,840.00	432,178	130,517,648	27,227,192
3	Sewa Kendaraan Pimpinan	PT. KLAKE AUTO GRAHA	EP-01JTQB5ZFBNCNYPTW8S74B24PE	27 Mei 2025	27 Mei 2025	26 Mei 2026	365	219	166,200,012.00	455,342	99,720,007	66,480,005
4	Sewa Kendaraan Pimpinan	PT. KLAKE AUTO GRAHA	EP-01JTMW0DJKVG4B7EDE4TJGJZ13	27 Mei 2025	27 Mei 2025	26 Mei 2026	365	219	397,200,000	1,088,219	238,320,000	158,880,000
5	Sewa Kendaraan Operasional/Pimpinan	KOPERASI MANDIRI SEJAHTERA	EP-01K41SDORCEY9ZHJBFX93160JB8	10 September 2025	1 Oktober 2025	1 Oktober 2026	366	92	385,200,000	1,052,459	96,826,230	288,373,770
6	Sewa Kendaraan Operasional/Pimpinan	KOPERASI MANDIRI SEJAHTERA	EP-01JZ5C5NF17DRQP5Y5HN6D0154	03 Juli 2025	04 Juli 2025	03 Juli 2026	365	181	420,000,000	1,150,685	208,273,973	211,726,027
7	Sewa Gudang Barang Bukti	SOBIRIN	PL.02.01.25.252.10.25.8554	10 Oktober 2025	14 Oktober 2025	14 Oktober 2026	366	79	183,000,000	500,000	39,500,000	143,500,000
8	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Eselon I (Deputi I)	AGUS SUGIARTO, SH	PL.02.03.251.08.25.7579	12 Agustus 2025	12 Agustus 2025	11 Agustus 2026	365	142	251,500,000	689,041	97,843,836	153,656,164
9	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Eselon I (Deputi II)	HENLIS ROSDIANA SIHOMBING	PL.02.01.252.10.25.10005	31 Oktober 2025	7 November 2025	6 November 2026	365	55	251,100,000	687,945	37,836,986	213,263,014
10	Sewa Rumah/Apartemen Dinas Kepala BPOM	PT. MENARA ASPEN PERSADA (ASCOTT THE RESIDENCE)	PL.02.03.251.08.25.7580	12 Agustus 2025	23 Agustus 2025	22 Agustus 2026	365	131	882,000,000	2,416,438	316,553,425	565,446,575
11	Sewa Rumah Dinas Sestama	PURWANDARU RAFI WICAKSANA	PL.02.01.252.10.25.9484	14 Oktober 2025	14 November 2025	13 November 2026	365	48	161,112,000	441,403	21,187,332	139,924,668
Jumlah									3,803,308,052	10,415,769	1,828,822,405	1,974,485,647

REKAP BELANJA PEGAWAI TAHUN 2025 YANG MASIH HARUS DI BAYAR TAHUN 2026

No	Dokumen		Uraian	Nilai	Keterangan
	Tgl	Nomor			
1	06/02/2026	00196T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Gaji Desember 2025 an Marina Tata pada Satker Deputi 2	450.000	Telah terbit SP2D nomor 261750000005710 tgl. 09/02/2026
2	25/02/2026	00336T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur Desember 2025 untuk 22 Pegawai sesuai SPKL Nomor 134-2464 tanggal 28 November 2025 pada Satker Sekretariat Utama (Kedeputian 1,2,4)	12.403.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000010434 tgl. 26/02/2026
3	24/02/2026	00331T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PPPK November 2025 untuk 15 Pegawai sesuai SPKL Nomor 527-622 tanggal 1 November 2025 pada Satker Sekretariat Utama	6.595.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000011451 tgl. 24/02/2026
4	24/02/2026	00332T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur PPPK Desember 2025 untuk 13 Pegawai sesuai SPKL Nomor 135-2465 tanggal 28 November 2025 pada Satker Sekretariat Utama	4.360.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000010435 tgl. 24/02/2026
5	25/02/2026	00334T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur November 2025 untuk 44 pegawai pada sesuai SPKL Nomor 526-625 Tanggal 3 November 2025 pada satker Sekretariat Utama (Kedeputian 1)	14.204.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000010895 tgl. 25/02/2026
6	25/02/2026	00323T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur November 2025 pada satker Sekretariat Utama	16.418.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000010893 tgl. 25/02/2026
7	25/02/2026	00325T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Uang Lembur Desember 2025 pada satker Sekretariat Utama	18.768.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000010894 tgl. 25/02/2026
8	06/02/2026	00191T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Uang Makan Desember 2025 untuk 91 pegawai pada satker Sekretariat Utama	5.359.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000005710 tgl. 10/02/2026
9	06/02/2026	00193T	Pembayaran Belanja Pegawai berupa Kekurangan Uang Makan PPPK Desember 2025 untuk 16 pegawai pada satker Sekretariat Utama	1.777.000	Telah terbit SP2D nomor 2617500000005707 tgl. 09/02/2026
10	31/03/2026	00650T	Pembayaran Belanja Pegawai ymh Dibayar berupa Kekurangan Gaji KGB April sd Desember 2025 an Elviera Altin pada Satker Deputi 2	1.590.900	Telah terbit SP2D nomor 2617500000024198 tgl. 02/04/2026
11	31/12/2025	05.14.JP	Kekurangan Pembayaran dari Penyesuaian Tunjangan Kinerja untuk Pegawai yang menjalani tugas belajar dengan diberhentikan dari jabatannya	11.189.777	UJK BPK atas Koreksi kurang catat Utang Kepada Pihak Ketiga dan untuk pembayaran akan dilakukan di TA 2026
Total				93.114.677	

REKAP PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

No	Nama Penyewa	No Kontrak	Tanggal Kontrak	Tanggal Sewa		Nilai Kontrak	Jangka Waktu (bulan)	Pendapatan Sewa per bulan	Pendapatan Sewa			Pendapatan Sewa s/d 31 Desember 2025	Pendapatan Diterima Dimuka
				Mulai	Selesai				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)/(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)=(10)+(11)+(12)	(14)=(7)-(13)
1	BANK MANDIRI	PL.03.06.25.251.09.23.02	29 September 2023	16 Agustus 2023	15 Agustus 2026	47.859.000	36	1.329.417	6.003.817	15.953.000	15.953.000	37.909.817,20	9.949.183
													0
2	AWANG ROKHAYADI (Kantin Mezanin)	PL.03.06.25.12.24.03	26 November 2024	26 November 2024	25 November 2025	32.605.000	12	2.717.083		3.169.930	29.435.070	32.605.000,00	0
		PL.03.06.25.12.25.06	28 November 2025	28 November 2025	27 November 2026	19.058.697	12	1.588.225			1.747.048	1.747.048,00	17.311.649
												-	0
3	KOPERPOM (Kantin Pikoelan)	AdendumPL.03.06.25.03.25.01	7 Maret 2025	01 September 2024	28 Oktober 2024	5.423.334	2	2.711.667			5.423.334	5.423.334,00	0
		PL.03.06.25.12.24.67	29 Oktober 2024	29 Oktober 2024	28 Oktober 2025	70.741.500	12	5.895.125		12.360.746	58.380.754	70.741.500,00	0
		AdendumPL.03.06.25.01.26.01	7 Desember 2025	29 Oktober 2025	14 Desember 2025	8.527.742	2	4.263.871			8.527.742	8.527.742,00	0
4	AWANG ROKHAYADI (Kantin Pikoelan)	PL.03.06.25.12.25.08	15 Desember 2025	15 Desember 2025	14 Desember 2026	13.876.500	12	1.156.375			634.141	634.141,00	13.242.359
												-	0
5	BANK BRI	PL.03.06.25.06.25.04	25 Juni 2025	25 Juni 2025	24 Juni 2026	19.152.000	12	1.596.000			9.895.200	9.895.200,00	9.256.800
													0
TOTAL						217.243.773			6.003.817	31.483.676	129.996.289	167.483.782	49.759.991

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024

No	Temuan Pemeriksaan	Rekomendasi	Rencana Aksi	Waktu Pelaksanaan
Belanja Barang				
1	Pertanggungjawaban Belanja Barang/Jasa Kegiatan Operasi Intelijen dan Penyidikan pada Deputi Bidang Penindakan Belum Memadai Pemeriksaan atas bukti pertanggungjawaban belanja kegiatan intelijen dan penyidikan pada Deputi Bidang Penindakan secara uji petik, menunjukkan bahwa realisasi belanja hanya didukung dengan bukti penyerahan uang dari Bendahara Pengeluaran kepada tim intelijen dan tim penyidik, serta bukti perjalanan dinas tanpa stempel dan tanda tangan pihak yang berwenang di lokasi tujuan. Hal tersebut mengakibatkan pertanggungjawaban belanja intelijen dan penyidikan sebesar Rp927.357.261,00 (Rp97.824.108,00+ Rp829.533.153,00) tidak dapat diyakini kewajarannya dan tidak disertai dokumen pendukung. Kondisi tersebut disebabkan oleh Kepala BPOM belum sepenuhnya optimal dalam menetapkan regulasi terkait pelaksanaan anggaran berkaitan dengan pertanggungjawaban belanja intelijen dan/atau penyidikan yang selaras dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar menginstruksikan Sekretaris Utama untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebijakan pertanggungjawaban belanja intelijen/dan penyidikan di BPOM	Bukti koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebijakan pertanggungjawaban belanja intelijen/dan penyidikan di BPOM	TW IV 2025
Kas dan Setara Kas				
2	Pengelolaan Kas pada BPOM Belum Memadai a. Terdapat sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran Deputi I per 31 Desember 2024 sebesar Rp495.957,00 b. Penatausahaan Rekening Penampungan Dana Titipan/Barang Bukti belum memadai c. Terdapat Penggunaan Realisasi TUP untuk Pengadaan Belanja Modal d. Realisasi TUP Melebihi/Tidak sesuai Rencana MAK Belanja pada Pengajuan TUP e. Tidak Terdapat Pemisahan Fungsi antara Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan Verifikator Pengeluaran KKP (KPA/PPK/PPSPM) f. Penatausahaan pembayaran dan pertanggungjawaban Belanja Barang pada BBPOM di Pekanbaru belum memadai g. Pengeluaran belanja belum sepenuhnya menerapkan Prinsip SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Kondisi tersebut mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kas atas pengelolaan kas yang belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut disebabkan: a. Analisis Anggaran pada Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPPZA pada Deputi I belum sepenuhnya menyusun perencanaan kas secara memadai; b. KPA, Bendahara Pengeluaran, dan Tim Pengelola Barang Bukti pada Deputi IV serta KPA dan Bendahara Pengeluaran pada Balai POM di Mamuju kurang cermat dalam melakukan pengelolaan rekening penampungan data titipansesuai ketentuan; c. KPA, PPK, dan Bendahara Pengeluaran pada 43 Satker BPOM belum menyusun Rencana Penggunaan Dana atau Rencana Kas berdasarkan kebutuhan riil; d. KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran Deputi I, Deputi II, Deputi III dan Deputi IV kurang cermat dalam pengelolaan PTUP sesuai ketentuan; e. KPA pada 65 satker BPOM kurang cermat dalam melakukan pemisahan fungsi pembayaran sesuai ketentuan; f. KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran pada BBPOM di Pekanbaru kurang	BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar: a. Berkoordinasi dengan Kemenkeu terkait pengelolaan rekening penampungan dana titipan, dan segera menyusun peraturan internal terkait pengelolaan rekening tersebut sampai dengan proses inkrahit; b. Menginstruksikan Sekretaris Utama agar menyempurnakan SOP pengelolaan PTUP dengan menambahkan peran serta reviu Inspektorat Utama apabila terdapat kebutuhan signifikan penggunaan TUP yang tidak sesuai atau melampaui MAK; c. Menginstruksikan Sekretaris Utama agar menyempurnakan SOP pengelolaan keuangan dengan menambahkan peran reviu Inspektorat Utama secara periodik terhadap pertanggungjawaban pengeluaran dengan menggunakan KKP; dan; d. Menginstruksikan Sekretaris Utama dan Kepala UPT agar lebih cermat dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran sesuai ketentuan dan secara optimal melakukan pembayaran melalui mekanisme Cashless Management System (CMS).	a. Bukti koordinasi Kepala Badan POM dengan Kementerian Keuangan terkait pengelolaan rekening penampungan dana titipan, dan segera menyusun peraturan internal terkait pengelolaan rekening tersebut sampai dengan proses inkrahit; b. Bukti penyempurnaan SOP pengelolaan PTUP dengan menambahkan peran reviu Inspektorat Utama apabila terdapat kebutuhan signifikan penggunaan TUP yang tidak sesuai atau melampaui MAK. c. Bukti penyempurnaan SOP pengelolaan keuangan dengan menambahkan fungsi reviu Inspektorat Utama secara periodik terhadap pertanggungjawaban pengeluaran dengan menggunakan KKP.	TW IV 2025
			d. Surat Pernyataan Sekretaris Utama dan Kepala UPT agar lebih cermat dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran sesuai ketentuan dan secara optimal melakukan pembayaran melalui mekanisme Cashless Management System (CMS).	TW II 2025
Persediaan				
3	Penetapan Kebijakan Akuntansi Persediaan BPOM terkait Alat Kualitatif Belum Sepenuhnya Memadai Perlakuan akuntansi persediaan alat gelas kualitatif tersebut belum sepenuhnya menunjukkan asersi keberadaan (existence) atas akun persediaan yang riil dalam penyajian LK, dimana secara fisik barang alat gelas kualitatif tersebut ada dan dalam kondisi baik Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian dan pengungkapan Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2024 belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut disebabkan oleh Pengguna Barang kurang cermat dalam menetapkan Kebijakan Akuntansi Persediaan Alat Gelas Kualitatif sesuai SAP dan PMK Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat).	BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar: a. Menginstruksikan Sekretaris Utama berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali kebijakan akuntansi alat gelas kualitatif dengan mempertimbangkan jenis alat gelas, nilai kapitalisasi dan kemanfaatan dan selanjutnya menyusun kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut.	a.1. Bukti koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mengkaji kembali kebijakan akuntansi alat gelas kualitatif dengan mempertimbangkan jenis alat gelas, nilai kapitalisasi dan kemanfaatan dan selanjutnya menyusun kebijakan berdasarkan hasil kajian tersebut; a.2. Hasil kajian atas kebijakan akuntansi alat gelas kualitatif dengan mempertimbangkan jenis alat gelas, nilai kapitalisasi dan kemanfaatan.	TW IV 2025
Aset Tetap				
4	Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Tertib: Pencatatan perubahan kondisi atas 55 unit Peralatan dan Mesin pada tiga satker sebesar Rp407.563.000,00 tidak tertib	BPK merekomendasikan Kepala BPOM agar menginstruksikan Sestama memerintahkan Petugas Pengelola BMN supaya lebih tertib dalam penatausahaan BMN dan memerintahkan Biro Umum supaya berkoordinasi dengan satker untuk segera melakukan PSP atas BMN.	Surat Instruksi Sekretaris Utama kepada: KPB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Deputi Bidang Penindakan, Direktorat Penyidikan, Direktorat Siber, PPSDM, Loka POM Aceh Tengah, Loka POM Rejang Lebong, BPOM Manokwari, BPOM di Sofifi, BBPOM di Yogyakarta, BBPOM di Gorontalo, BPOM di Dumai Loka POM di Kab. Sanggau untuk menginstruksikan kepada Petugas pengelola BMN supaya lebih tertib dalam	TW II 2025

Lampiran 11: Capaian Output

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Unit Organisasi : 063
 Satuan Kerja : Sekretariat Utama
 Fungsi : 07
 Sub Fungsi : 07.01
 Program : 06031WA
 Lokasi : Jakarta

No	KRO/RO	Uraian RO	Belanja			Keluaran				Keterangan
			Pagu	Realisasi	%	Target	Satuan	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3158										
1	AEC001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan	5.315.127.000,00	2.027.191.855,00	38,14	70	Dokumen	70	100	-
2	EBA958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6.107.784.000,00	1.256.392.790,00	20,57	16	Layanan	16	100	-
3	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	742.714.000,00	131.912.366,00	17,76	1	Layanan	1	49,98	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
4	PEC002	Kegiatan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	662.620.000,00	138.792.767,00	17,76	1	Kegiatan	1	35,33	-
3159										
5	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.730.866.000,00	461.182.575	26,64	1	Layanan	1	49,98	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
6	EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.101.717.000,00	1.502.608.653,00	21,16	15	Dokumen	15	31,39	Sudah sesuai dengan target setelah efisiensi

7	EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.718.376.000,00	527.483.127,00	19,4	13	Dokumen	13	47,08	Target telah tercapai
8	EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	3.382.831.000,00	649.734.443,00	19,21	9	Dokumen	9	40,29	Realisasi sesuai dengan target volume dan penyerapan anggaran pagu efektif
4110										
9	AAH001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan	1.997.206.000,00	283.885.605,00	14,21	142	peraturan	142	17,56	Desember
10	ABL001	Rekomendasi Kebijakan Reformasi Birokrasi	675.350.000,00	56.948.733,00	8,43	2	RekomendasiKebijaka n	2	3,26	Desember
11	ABM001	Rekomendasi Kebijakan Pelayanan Publik	885.490.000,00	151.958.268,00	17,16	5	RekomendasiKebijaka n	5	80	Desember
12	BIC001	UPT yang melaksanakan KIE dengan efektif	819.560.000,00	135.368.716,00	16,52	3	Laporan	3	23,14	Desember
13	BMB001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan	1.524.045.000,00	423.528.256,00	27,79	4	layanan	4	22,72	Desember
14	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3.358.589.000,00	795.447.927,00	23,68	9	Layanan	9	44,44	Desember
15	EBA969	Layanan Bantuan Hukum	1.480.000.000,00	660.017.193,00	44,6	200	Layanan	200	30	Desember
4112										
16	ABQ001	Kebijakan Transformasi Manajemen ASN	2.366.315.000,00	185.561.159,00	7,84	4	RekomendasiKebijaka n	4	50	Capaian kebijakan yang dihasilkan
17	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.482.416.000,00	491.190.570,00	33,13	1	Layanan	1	50	Capaian diperoleh dari layanan organisasi dan tata Kelola

										internal yang diselesaikan
18	EBC954	Layanan Manajemen SDM	5.772.651.000,00	1.344.286.281,00	23,29	4116	Orang	4116	50	Layanan Manajemen SDM telah diberikan 100% kepada seluruh pegawai dan CASN di Lingkungan BPOM
6384										
19	CAN001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	974.260.000,00	943.950.722,00	96,89	63	Unit	63	35,95	Sudah semua terealisasi
20	EBA956	Layanan BMN	122.418.000,00	14.379.800,00	11,75	1	Layanan	1	49,98	Sudah semua terealisasi, sisa anggaran blokir
21	EBA959	Layanan Protokoler	7.004.487.000,00	4.304.214.104,00	61,45	1	Layanan	1	49,98	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
22	EBA960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.031.821.000,00	27.550.000,00	2,67	1	Layanan	1	49,99	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui
23	EBA962	Layanan Umum	14.264.012.000,00	3.559.638.417,00	24,96	1	Layanan	1	49,98	Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui

24	EBA994	Layanan Perkantoran	702.566.641.000,00	656.735.505.085,00	93,48	1	Layanan	1	58,1 7	Sudah semua terelaisasi, sisa anggaran diblokir
25	EBB951	Layanan Sarana Internal	1.116.054.000,00	1.116.017.943,00	100	66	Unit	40	50	Sudah terealisasi secara keseluruhan kegiatan
26	EBB971	Layanan Prasarana Internal	3.387.237.000,00	3.353.495.350,00	99	8	Unit	7	84,3 2	Sudah terealisasi secara keseluruhan kegiatan, sisa anggaran blokir

SEKRETARIAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
LAMPIRAN MONSAKTI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063
ESELON I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 432731

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:33 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	474,401,407	474,401,407	0	111,018,000	474,049,148	(363,031,148)	427
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	474,401,407	474,401,407	0	111,018,000	474,049,148	(363,031,148)	427
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	474,401,407	474,401,407	0	111,018,000	474,049,148	(363,031,148)	427
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	778,590,550,000	681,260,064,644	(97,330,485,356)	87	425,010,856,000	407,426,851,237	17,584,004,763	96
1. Belanja Pegawai	599,370,602,000	593,491,939,419	(5,878,662,581)	99	237,625,153,000	237,416,011,985	209,141,015	100
2. Belanja Barang	177,004,280,000	85,582,807,922	(91,421,472,078)	48	176,045,240,000	162,499,390,225	13,545,849,775	92
3. Belanja Modal	2,215,668,000	2,185,317,303	(30,350,697)	99	11,340,463,000	7,511,449,027	3,829,013,973	66
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 063
ESELON I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 432731

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:33 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	778,590,550,000	681,260,064,644	(97,330,485,356)	87	425,010,856,000	407,426,851,237	17,584,004,763	96
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat



Anton Tarigan

ANTONIUS TARIGAN
NIP. 196904031995031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:35 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	41,650,000,000	0	41,650,000,000	0.00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	1,974,485,647	1,895,628,632	78,857,015	4.16
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	15,200,000	0	15,200,000	0.00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(76,000)	0	(76,000)	0.00
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)	15,124,000	0	15,124,000	0.00
Persediaan	1,500,801,938	1,590,912,863	(90,110,925)	(5.66)
JUMLAH ASET LANCAR	45,140,411,585	3,486,541,495	41,653,870,090	1,194.70
ASET TETAP				
Tanah	619,414,000,000	619,414,000,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	118,937,734,919	120,776,460,236	(1,838,725,317)	(1.52)
Gedung dan Bangunan	256,847,600,783	250,211,245,569	6,636,355,214	2.65
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	2,652,019,735	(2,652,019,735)	(100.00)
Aset Tetap Lainnya	352,783,472	853,791,382	(501,007,910)	(58.68)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	4,155,302,624	(4,155,302,624)	(100.00)
AKUMULASI PENYUSUTAN	(165,761,926,469)	(149,739,651,646)	(16,022,274,823)	10.70
JUMLAH ASET TETAP	829,790,192,705	848,323,167,900	(18,532,975,195)	(2.18)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,633,408,000	4,831,513,300	(198,105,300)	(4.10)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3,377,821,317	3,712,267,551	(334,446,234)	(9.01)
Aset Lain-lain	45,649,324	0	45,649,324	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,592,222,297)	(4,686,572,980)	94,350,683	(2.01)
JUMLAH ASET LAINNYA	3,464,656,344	3,857,207,871	(392,551,527)	(10.18)
JUMLAH ASET	878,395,260,634	855,666,917,266	22,728,343,368	2.66
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,815,744,705	36,524,277,424	(32,708,532,719)	(89.55)
Pendapatan Diterima Dimuka	49,759,991	113,718,007	(63,958,016)	(56.24)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,865,504,696	36,637,995,431	(32,772,490,735)	(89.45)
JUMLAH KEWAJIBAN	3,865,504,696	36,637,995,431	(32,772,490,735)	(89.45)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	874,529,755,938	819,028,921,835	55,500,834,103	6.78
JUMLAH EKUITAS	874,529,755,938	819,028,921,835	55,500,834,103	6.78
JUMLAH EKUITAS	874,529,755,938	819,028,921,835	55,500,834,103	6.78

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:35 PM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	878,395,260,634	855,666,917,266	22,728,343,368	2.66

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Utama



Anton Tarigan

ANTONIUS TARIGAN
NIP. 196904031995031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ESELON I : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:35 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	155,540,583	96,875,285	58,665,298	60.558
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	155,540,583	96,875,285	58,665,298	60.558
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	155,540,583	96,875,285	58,665,298	60.558
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	560,182,932,330	269,593,572,072	290,589,360,258	107.788
Beban Persediaan	1,113,500,960	1,568,711,285	(455,210,325)	(29.018)
Beban Barang dan Jasa	64,635,556,606	83,771,053,887	(19,135,497,281)	(22.843)
Beban Pemeliharaan	9,709,341,398	18,424,513,567	(8,715,172,169)	(47.302)
Beban Perjalanan Dinas	10,040,037,923	57,451,106,433	(47,411,068,510)	(82.524)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
ESELON I : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:35 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	19,947,763,863	22,600,324,725	(2,652,560,862)	(11.737)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(8,651,273)	0	(8,651,273)	()
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	665,620,481,807	453,409,281,969	212,211,199,838	46.803
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(665,464,941,224)	(453,312,406,684)	(212,152,534,540)	46.801
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	(398,896,394)	110,904,000	(509,800,394)	(459.677)
Pendapatan Pelepasan Aset	262,393,680	137,964,000	124,429,680	90.19
Beban Pelepasan Aset	661,290,074	27,060,000	634,230,074	2,343.792
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	115,634,337	182,117,838	(66,483,501)	(36.506)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	115,634,337	189,667,838	(74,033,501)	(39.033)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	7,550,000	(7,550,000)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(283,262,057)	293,021,838	(576,283,895)	(196.669)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(665,748,203,281)	(453,019,384,846)	(212,728,818,435)	46.958
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(665,748,203,281)	(453,019,384,846)	(212,728,818,435)	46.958

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat



ANTONIUS TARIGAN
NIP. 196904031995031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 6:35 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:36 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	819,028,921,835	912,112,873,100	(93,083,951,265)	(10.21)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(665,748,203,281)	(453,019,384,846)	(212,728,818,435)	46.96
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(1,078,716,528)	10,514,273	(1,089,230,801)	(10,359.54)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	1,332,000	0	1,332,000	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(150,919,734)	10,514,273	(161,434,007)	(1,535.38)
LAIN-LAIN	(929,128,794)	0	(929,128,794)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	722,327,753,912	359,924,919,308	362,402,834,604	100.69
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	55,500,834,103	(93,083,951,265)	148,584,785,368	(159.62)
EKUITAS AKHIR	874,529,755,938	819,028,921,835	55,500,834,103	6.78

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat



Antonius Tarigan

ANTONIUS TARIGAN

NIP.196904031995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:36 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	41,650,000,000	0
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	1,974,485,647	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	15,200,000	0
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	76,000
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,468,754,114	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	32,047,824	0
0.0	131111	Tanah	619,414,000,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	118,937,734,919	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	256,847,600,783	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	352,783,472	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	104,815,991,940
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	60,689,427,079
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	256,507,450
0.0	162151	Software	4,633,408,000	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	3,377,821,317	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	19,899,324	0
0.0	166115	Konstruksi Dalam Pengerjaan yang Dihentikan dari Operasi	25,750,000	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	12,792,422
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,579,429,875
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	93,114,677
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	373,733,456
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	3,348,896,572
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	49,759,991
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	681,260,064,644
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	474,401,407	0
0.0	313211	Transfer Keluar	113,512,450	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	5,603,125
0.0	391111	Ekuitas	0	819,028,921,835
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	150,919,734	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	929,128,794	0
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	41,650,000,000
0.0	391151	Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	1,332,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	28,290,180
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	234,103,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	129,996,289
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	15,200,000
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	25,544,294

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:36 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,727,512
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,088,205
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	56,618,620
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	65,150,912,691	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	893,644	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	3,873,452,276	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	1,017,772,759	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	1,512,235,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	10,748,482,332	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	22,386,975,111	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	2,986,238,700	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	10,056,186,000	0
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	15,300,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	434,535,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	13,079,178,991	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	200,448	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	696,916,458	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	163,033,430	0
3.0	511623	Beban Tunjangan Struktural PPPK	105,875,000	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	1,317,557,333	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	646,457,130	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	2,447,079,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	127,665,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	486,779,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	106,712,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	383,000,124,960	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	39,822,370,067	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	12,475,255,213	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	179,398,966	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	56,662,935	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	1,490,169,500	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1,385,800,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	5,427,312,100	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	500,602,245	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	4,563,060,971	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	82,044,476	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	782,579,469	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 7:37 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:36 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	229,648,344	0
3.0	522141	Beban Sewa	6,703,216,138	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	2,211,020,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	28,548,786,249	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,660,987,965	0
3.0	523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	1,377,169,622	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,525,526,031	0
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	24,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7,022,668,612	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	541,468,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	482,435,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,055,629	0
3.0	524219	Beban Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,968,410,682	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	10,648,996,363	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	9,181,288,999	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	116,057,120	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	1,421,381	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,113,500,960	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	121,657,780	0
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	8,651,273
3.0	596111	Beban Pelepasan Aset	661,290,074	0
JUMLAH			1,716,707,870,939	1,716,707,870,939

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat



ANTONIUS TARIGAN

NIP. 196904031995031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 6:35 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:36 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	681,260,064,644
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	474,401,407	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	28,290,180
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	234,103,500
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	66,038,273
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	8,727,273
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	25,544,294
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	42,727,512
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,088,205
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	11,263,550
3.0	425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	56,618,620
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	65,186,199,320	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	905,705	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,882,831,548	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	1,017,815,545	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	1,518,330,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	10,762,794,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	22,387,059,517	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	2,987,831,940	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	10,050,868,000	0
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	15,300,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	439,905,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	13,079,178,991	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200,448	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	696,916,458	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	163,033,430	0
3.0	511623	Belanja Tunjangan Struktural PPPK	105,875,000	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1,317,557,333	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	646,457,130	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	2,445,302,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	127,665,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	572,469,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	146,458,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	413,857,008,451	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	42,187,744,292	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	12,475,255,213	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	179,398,966	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Tgl Data : 04/05/26 6:35 PM

Tgl Cetak : 04/05/26 10:36 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	56,662,935	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,496,703,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,385,800,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	5,428,146,286	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500,602,245	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,014,424,675	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	4,623,408,977	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	82,296,670	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	782,579,469	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	229,648,344	0
3.0	522141	Belanja Sewa	6,782,073,153	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	2,211,100,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	28,577,710,994	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,660,987,965	0
3.0	523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	1,377,169,622	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5,525,526,031	0
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136,723,140	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	24,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,066,470,068	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	541,468,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	482,435,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25,055,629	0
3.0	524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri	1,968,410,682	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,468,990,053	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	4,778,600	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	661,553,650	0
3.0	536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	49,995,000	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	36,493,529
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	12,061
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	9,499,962
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	91,062
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	6,095,000
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	14,761,668
3.1	511125	Pengembalian Belanja Tunj. PPh PNS	0	299,440
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	1,593,240
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	41,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	5,370,000
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	29,509,727

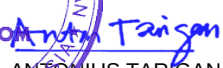
NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (432731) SEKRETARIAT UTAMA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Tgl Data : 04/05/26 6:35 PM
Tgl Cetak : 04/05/26 10:36 PM
Halaman : 3
lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	6,533,500
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	834,186
3.1	522151	Pengembalian Belanja Jasa Profesi	0	80,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	43,801,456
JUMLAH			681,889,481,882	681,889,481,882

Keterangan :
FINAL

Jakarta, 4 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat

ANTONIUS TARIGAN
190904031995031001

